



**MEDIA SEBAGAI ALAT KONTROL SOSIAL:
Tajuk Tentang Politik Dalam Warta Sepekan *SIASAT*
1950 - 1957**

Tesis

**Diajukan untuk memperoleh gelar Magister Humaniora
Pada Program Pascasarjana Ilmu Sejarah
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Universitas Indonesia**

Oleh

**Albiner Hutauruk
NIM: 6705040016**

**UNIVERSITAS INDONESIA
2008**

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah diajukan pada hari Selasa, tanggal 29 Juli 2008, Pukul 10.00-11.00 WIB, dengan susunan penguji sebagai berikut:

Tanda tangan

1. Dr. Priyanto Wibowo
Ketua Penguji
2. Dr. Zeffry Alkatiri
Pembimbing I / Penguji
3. Kasijanto, M.Hum
Pembimbing II / Penguji
4. Dr. Suharto
Penguji
5. Tri Wahyuning M. Irsyam, M.Si
Penguji / Panitera

Disahkan oleh

Ketua Program Studi Ilmu Sejarah
Program Pascasarjana
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Universitas Indonesia

Dekan
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Universitas Indonesia

Dr. Priyanto Wibowo
NIP. 131 689 560

Dr. Bambang Wibawarta
NIP. 131 882 265

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

AMS	Algemene Middelbare School
APRA	Angkatan Perang Ratu Adil
APRIS	Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat
CPN	Comunistische Partij Nederlandsch
AD	Angkatan Darat
AURI	Angkatan Udara Republik Indonesia
BFO	Bijenkooft voor Federal Overleg
BP KNIP	Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat
DI	Darul Islam
DPRS	Dewan Perwakilan Rakyat Sementara
DPA	Dewan Pertimbangan Agung
GRR	Gerakan Revolusi Rakyat
HIS	Hollandsch-Inlandsch School
KMB	Konferensi Meja Bundar
KNIL	Koninklijke Nederlandsch Indische Lager
KNIP	Komite Nasional Indonesia Pusat
KTN	Komisi Tiga Negara
Lekra	Lembaga Kebudayaan Rakyat
NICA	Netherlands Indies Civil Administration
NIT	Negara Indonesia Timur
ORI	Oeang Republik Indonesia

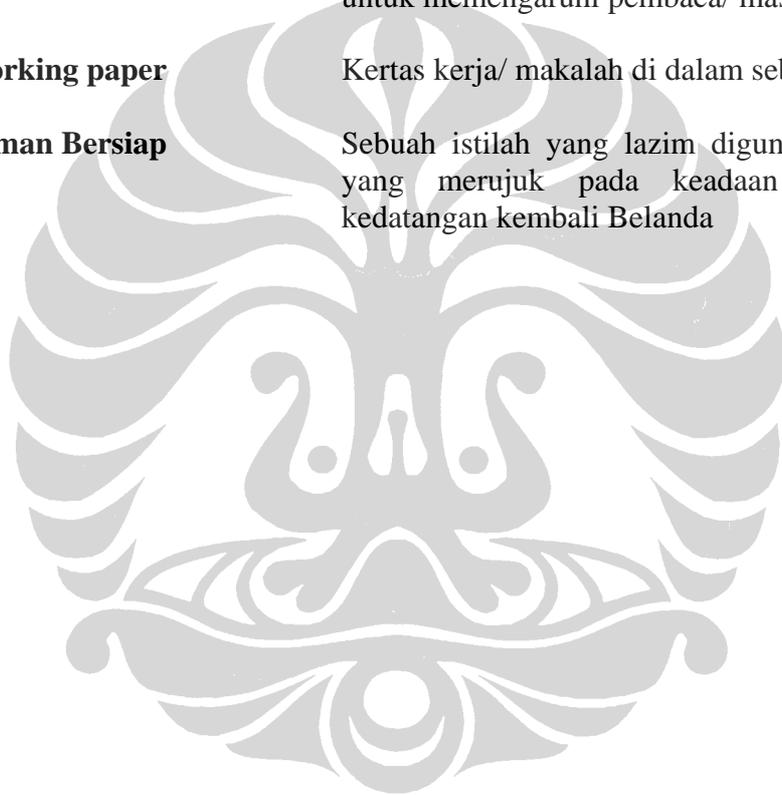


PBB	Perhimpunan Bangsa-Bangsa
Pemred	Pemimpin Redaksi
PKI	Partai Komunis Indonesia
PNI	Partai Nasional Indonesia
PSI	Partai Sosialis Indonesia
SMT	Sekolah Menengah Tinggi
SOBSI	Sarekat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia
Pemilu	Pemilihan Umum
PP	Peraturan Pemerintah
RMS	Republik Maluku Selatan
RRT	Republik Rakyat Tiongkok
RVD	Regerings Voorlichtings Dients
RIS	Republik Indonesia Serikat
STOVIA	School tot Opleideing van Inlandsche Artsen
TII	Tentara Islam Indonesia
TNI	Tentara Nasional Indonesia
UU	Undang-Undang
UUD	Undang-Undang Dasar

DAFTAR ISTILAH

Advertorial	Iklan di surat kabar dalam bentuk narasi yang bersifat promosi
Advertensi	Iklan atau promosi tentang suatu produk di surat kabar
Das Solen	Apa yang semestinya terjadi
Das Sein	Kenyataan yang terjadi/ fakta
Editorial	Komentar dari pengelola redaksi terhadap suatu kejadian/peristiwa
Gunseikanbu	Pemerintah militer Jepang di Indonesia
Gun Kenetsu Han	Kantor sensor balatentara pendudukan Jepang
Headline	Berita utama yang dimuat di halaman satu pada surat kabar
Lead	Kepala berita. Paragraf awal dalam sebuah berita yang berisi isi pokok berita
Logo type	Nama judul surat kabar yang terletak di halaman satu bagian atas
Masterhead	Kolom yang memuat nama-nama anggota redaksi pada media massa
Redaktur	Editor/ orang-orang yang bertanggung jawab di dalam penyuntingan berita
Referendum	Pengambilan keputusan yang berdasarkan jajak pendapat rakyat
Straight News	Juga lazim disebut <i>hardnews</i> . Berita yang didasarkan atas deskripsi kejadian/ peristiwa dan memuat unsur-unsur dasar pemberitaan, yakni <i>what</i> (apa), <i>why</i> (kenapa), <i>where</i> (di mana), <i>who</i> (siapa), <i>when</i> (kapan) dan <i>how</i> (bagaimana)
Tajuk	Pokok pikiran atau pendapat dari pengasuh redaksi tentang satu peristiwa tertentu yang terjadi

Onderbouw	kaki-tangan, organisasi atau orang yang berafiliasi di bawah suatu organisasi tertentu
Opini	Tulisan tentang sesuatu hal yang mencerminkan pendapat subyektif si penulisnya
Personal Journalism	Istilah yang merujuk kepada corak pemberitaan dengan pemilik media massa
Psywar	Perang urat syaraf. Merujuk pada perang informasi berkenaan satu atau lebih versi yang hendak digunakan untuk memengaruhi pembaca/ masyarakat luas
Working paper	Kertas kerja/ makalah di dalam sebuah konferensi
Zaman Bersiap	Sebuah istilah yang lazim digunakan pada era revolusi yang merujuk pada keadaan bersiap menghadapi kedatangan kembali Belanda



Kata Pengantar

Segala Puji syukur Kehadirat Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kemampuan pada penulis untuk menyelesaikan Tesis ini sebagai syarat menyelesaikan kuliah di Program Pascasarjana Universitas Indonesia dengan judul :
 “MEDIA SEBAGAI ALAT KONTROL SOSIAL : Tajuk tentang Politik dalam Warta Sepekan *SIASAT* 1950 - 1957”. Penelitian ini merupakan kajian pada suatu media dengan fungsi kontrol terhadap perkembangan politik Indonesia Pascakemerdekaan Indonesia 1950 - 1957.

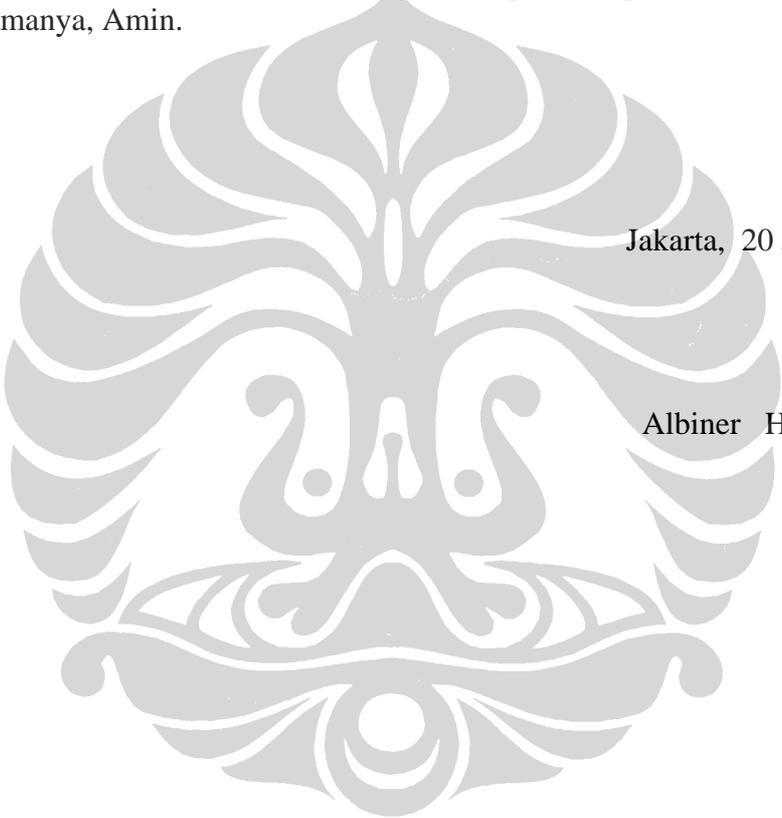
Penulis menyadari masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan dalam penyelesaian Tesis ini, sehingga penulis mengharapkan Tesis ini dapat memotivasi penulis lain untuk melakukan yang lebih sempurna.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis selama proses penyelesaian Tesis ini, khusus nya kepada :

1. Bapak Dr. Zeffry Alkatiri, selaku Pembimbing I. Saya hanya dapat menyampaikan hormat dan terima kasih untuk segala pengarahan dan dorongan yang begitu berarti, beliau selalu menyediakan waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan serta motivasi untuk lebih giat menyelesaikan Tesis ini.
2. Bapak Kasijanto, M.Hum, selaku Pembimbing II. Arahan, bimbingan, kedekatan serta pengertian beliau lebih memberi semangat dalam merampungkan Tesis ini.
3. Bapak Dr. Priyanto Wibowo, bapak Dr.Suharto, Ibu Tri Wahyuning M.Irsyam, M.Si, serta segenap Dosen dan para pegawai Fakultas Pascasarjana Ilmu Budaya Universitas Indonesia yang banyak berjasa dalam menambah Ilmu Pengetahui penulis selama perkuliahan.
4. Rekan-rekan Mahasiswa Pascasarjana FIB UI Program Studi Sejarah Angkatan tahun 2005 yang tidak terlupakan, Humaidi, Hiroshi Harima, Rudi, Shanty Marhen, Nur Aeni, Nurdiana, khususnya pada Bonnie Triyana yang banyak sekali membantu penulis.
5. Ibunda tercinta Ny. T. Hutauruk – Br. Simamora (Op. Richard) sembah sujud ananda atas segala dukungan doanya setiap saat memberikan kekuatan tersendiri khusus nya dalam penyelesaian Tesis ini. Seandainya Ayahanda T. Hutauruk (Alm) masih hidup, beliau juga akan merasakan rasa bahagia dan ucapan terima kasih ini.
6. Buat Isteriku tercinta Dra. Nurarta Situmorang, M.Si, yang memotivasi penulis untuk mengikuti Pascasarjana. Anak-anakku terkasih Amelia Grace Rotama Hutauruk, Bitu Zefani Rogata Hutauruk, kalian anugerah terindah dan sumber motivasi dalam hidupku, mari kita meraih hidup lebih bahagia lagi sebab hari esok akan lebih indah dibandingkan hari ini.
7. Punguan (Persekutuan) Hutauruk dohot Boruna Se-Jabodetabek dengan dukungan Doa dan dana selama dalam perkuliahan sampai selesai.
8. Pucuk pimpinan HKBP Bapak Pdt.Dr.Bonar Napitupulu yang memberi izin Studi di luar tanggungan HKBP. Dan kepada Teman Pendeta dan Gereja yang banyak membantu selama perkuliahan sampai selesai, khususnya HKBP Srengseng Sawah Lenteng Agung tempat pelayanan sebelum mengikuti kuliah di Universitas

Indonesia, HKBP Sunter (Pdt.Eldarton Simbolon,STh), HKBP Mampang (Pdt.E.O.Hutauruk), HKBP Depok I (Pdt.R.Siahaan,STh) HKBP Depok II, HKBP Depok Timur, HKBP Cibubur (Pdt.Drs.B.Tamba,M.Div) dan beberapa Gereja lain dan beberapa teman pendeta yang tidak disebut satu demi satu. Tentunya banyak mendukung penulis, khususnya Bapak Pdt. Bilman Simanungkalit,STh,SE (Dosen Universitas Kristen Indonesia) yang banyak mengarahkan penulis menjadi pendeta yang rendah hati dan berdedikasi tinggi.

Dengan segala bantuannya, penulis sangat merasakan tuntunan Tuhan sebagaimana firmanNya dalam **Mazmur 23 :1 Tuhan adalah gembalaku takkan kekurangan aku.** Tuhan Yesus Kristus kiranya tetap melimpahkan berkatNya, kini, esok dan selamanya, Amin.



Jakarta, 20 Juli 2008

Albiner Hutauruk

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	i
Abstrak	ii
Abstrak	iii
Daftar Singkatan dan Akronim	iv
Daftar Istilah	vi
Kata Pengantar	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Lingkup Penelitian.....	10
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Tinjauan Pustaka.....	11
F. Metode Penelitian dan Penggunaan Sumber.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	17

BAB II Gambaran Umum Pers di Indonesia Masa Revolusi dan Lahirnya Warta Sepekan *Siasat*

A. Keadaan Pers di Zaman Revolusi.....	19
B. Terbitnya Warta Sepekan <i>Siasat</i>	27
C. Profil Pengelola Redaksi <i>Siasat</i>	31
D. Benang Merah Pemikiran Rosihan Anwar dengan Soedjatmoko.....	37
E. Sumbangan Pemikiran Soedjatmoko dan Rosihan Anwar kepada <i>Siasat</i> dan Pengaruhnya Dalam Wacana Publik di Indonesia.....	44

BAB III Kebijakan Pemberitaan Warta Sepekan *Siasat*

A. Politik Redaksi Warta Sepekan <i>Siasat</i>	50
B. Rubrikasi Warta Sepekan <i>Siasat</i>	58
C. Distribusi dan Iklan di Warta Sepekan <i>Siasat</i>	63

BAB IV *Siasat* Sebagai Kontrol Sosial

A. <i>Siasat</i> Sebagai <i>Watchdog</i>	66
B. <i>Siasat</i> dan Politik Dalam Negeri.....	70
C. Diplomasi Irian Barat.....	80
D. <i>Siasat</i> dan Parlemen.....	85

BAB V Kesimpulan

Kesimpulan.....	93
Daftar Pustaka.....	96
Lampiran-lampiran.....	99

Abstrak

Sebagai media massa yang lahir dari situasi revolusi, Siasat memiliki peran yang tidak sedikit di dalam sejarah pers Indonesia. Didirikan oleh dua tokoh intelektual pers Indonesia, Soedjatmoko dan Rosihan Anwar, Siasat berupaya menjadi media masa yang membela kepentingan bangsa Indonesia ketika masa revolusi. George McTurnan Kahin mengatakan bahwa Siasat adalah media massa berhaluan sosialis yang cukup berpengaruh pada zamannya.

Media massa mingguan ini lahir pada 4 Januari 1947 dan mulai berakhir penerbitannya pada 1957. Pada periode tahun 1947-1950, Siasat menjadi media yang memerjuangkan kepentingan Republik Indonesia melawan Belanda. Ketika Indonesia diduduki oleh Belanda, Siasat tetap memilih terbit kendati beberapa kali dibredel oleh tentara Belanda. Namun demi berdirinya negara Indonesia, Siasat tetap terbit.

Pada masa tahun 1950-an, Siasat menjadi media yang bertugas mengawasi jalannya kekuasaan. Ia menjadi pengawas dan berfungsi sebagaimana layaknya media massa lainnya di dalam sejarah pers. Siasat berhasil menjadi media massa yang menyumbangkan pemikiran-pemikiran berharga bagi bangsa Indonesia.

Pada saat Indonesia memasuki era percobaan demokrasi, Siasat kembali memegang peran penting di dalam penyadaran masyarakat akan pentingnya demokrasi. Siasat juga melalui rubrik kebudayaan Gelanggang, menyumbangkan banyak gagasan tentang arah kebudayaan baru di Indonesia.

Kendati namanya jarang disebut-sebut dalam khasanah sejarah pers di Indonesia, Siasat memiliki peran tersendiri di dalam dinamika intelektual di Indonesia. Sehingga Siasat bolehlah dicatat sebagai media massa yang berhasil menyumbangkan peran penting dalam sejarah pers Indonesia.

Abstract

According to George McTurnan Kahin, *Siasat* is the most influencing socialist mass media. It found by two prominent journalist and inteligencia in Indonesia, Soedjatmoko and Rosihan Anwar in January 4 1947. As a media which found in the time of Indonesia revolution, *Siasat* have played an important role in the history of Indonesian press.

Siasat played an important role to against Dutch psy-war in media. During Dutch occupation in Indonesia, *Siasat* is the one media who struggle to defend Indonesia's independence. *Siasat* still publish even thought Dutch Army force the board of editor were consist from young journalist and intellectuals who knew very much what have they do in the new nation named Indonesia

Prior to 1950, *Siasat* stand side by side with Indonesian government to against the Dutch occupation. But after Round Table Conference in The Hague, *Siasat* tried to be a watchdog mass media who gave their critique to the government of Indonesia. Although it was a socialist weekly magazine, *Siasat* can be a media with broaden perspectives. Its cultural column, called "Gelanggang", attracted a number of young writers belonging to the "Generation of 45". It shows us how important *Siasat* democratization process in the early period of Indonesian independence.

Even thought *Siasat* has never mentioned in the Indonesian journalism history, *Siasat* has own role in Indonesian intellectual dynamics. In 1950's, *Siasat* become a media which oppose to the government it is strongly related to those in the board of editor who affiliate to the Indonesian Socialist Party (Partai Sosialis Indonesia).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia pada masa revolusi¹ (1945 – 1950) yang kemudian dilanjutkan dengan masa percobaan demokrasi liberal 1950 – 1957² merupakan periode yang menarik untuk diteliti. Indonesia pada masa itu, selain ditandai dengan situasi yang membahayakan eksistensi republik, seperti agresi militer dan berbagai upaya Belanda lainnya untuk kembali menjajah Indonesia, ditandai juga oleh kegairahan intelektual, khususnya di lapangan sastra dan kebudayaan.

Herbert Feith dan Lance Castles mencatat bahwa dalam periode itu untuk pertama kalinya muncul suatu kelompok intelektual yang boleh dikatakan tidak terikat, sekelompok tokoh yang bekerja di pinggir-pinggir arena politik, sebagai pengarang, wartawan, editor, penerbit, dosen universitas atau mahasiswa. Kelompok ini pada permulaan tahun 1950-an masih sangat kecil; bagian terbesar anggota-

¹ Perodesasi revolusi ini ditandai dengan Proklamasi 17 Agustus 1945 dan seluruh peristiwa yang mengikutinya. Batas akhir 1950 ditandai oleh penghapusan struktur konstitusional semasa tahun-tahun Revolusi. Lihat M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern, 1200-2004* (Jakarta: Serambi, 2004) hal. 428 – 468.

² Ricklefs membagi periode sejarah Indonesia tahun 1950 – 1957 sebagai masa percobaan demokrasi. *Ibid.*, hal. 471-507.

anggota kelompok saling mengenal, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan kedudukan kelompok ini belum melembaga.³

Dampak dari kegairahan intelektual itu dapat dilihat dari kemunculan beragam media massa⁴, baik koran maupun majalah yang hendak menegaskan tentang sebuah identitas bangsa yang baru merdeka: Indonesia. Media massa republik ini berhadapan langsung dengan media terbitan Jawatan Penerangan Belanda, *Het Uizicht*. Dalam pada itu tampak pula bahwa perang tak hanya dilakukan secara militer, melainkan juga dengan jalan perang informasi yang dimaksudkan untuk membangun opini di tengah masyarakat Indonesia. Baik Belanda maupun Indonesia tentu saja membutuhkan dukungan dari rakyat, sehingga informasi untuk membangun opini memiliki kedudukan yang sangat penting.⁵

³ Herbert Feith dan Lance Castles (ed.), *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965* (Jakarta: LP3ES, 1988) hal. xxxix-lxvii.

⁴ Setelah Indonesia merdeka terbit beberapa media massa seperti *Berita Indonesia* yang didirikan oleh S. Tahsin dan BM Diah, dan juga koran *Merdeka* yang dikelola oleh BM Diah dan Rosihan Anwar. Departemen Penerangan RI pun menerbitkan majalah berbahasa Belanda *Het Inzicht* sebagai upaya menghadapi propaganda Belanda melalui terbitannya, *Het Uizicht*. *Het Inzicht* adalah majalah tempat Soedjatmoko, pendiri SIASAT bekerja untuk kali pertama sebagai wartawan. Tujuan dari majalah itu adalah untuk menjaga komunikasi dengan pihak Belanda supaya mengerti posisi republik. Lihat M. Nursam dalam *Pergumulan Seorang Intelektual: Biografi Soedjatmoko* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002) hal. 64.

⁵ Mengenai keadaan pers Indonesia pada masa revolusi baca Rosihan Anwar, *Kenang-Kenangan Tentang Kehidupan Pers Indonesia di Masa Revolusi 1945-1949* dalam Panitia Konferensi Internasional 50 tahun Indonesia Merdeka, *Denyut Nadi Revolusi Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1997) hal. 55-65

Sama dengan koran *Merdeka*, *Berita Indonesia* atau pun *Pedoman*, *Siasat*⁶ adalah salah satu media massa yang juga bagian dari kegairahan intelektual pada saat itu. Majalah ini didirikan oleh Soedjatmoko dan Rosihan Anwar, dua intelektual muda Indonesia yang ketika itu dikenal sebagai tokoh pemikir-jurnalis sekaligus aktivis Partai Sosialis Indonesia atau dikenal sebagai *Sjahrriest* (pengikut Sutan Sjahrir).

Gagasan mendirikan *Siasat* muncul pada saat Rosihan Anwar dan Soedjatmoko menghadiri konferensi Malino pada bulan Juli 1946 di Makassar, Sulawesi Selatan. Dikisahkan oleh Rosihan⁷ bahwa ide mendirikan *Siasat* didiskusikan ketika dia dan Soedjatmoko berada di jamban. Setelah diskusi itu mereka sepakat untuk mendirikan majalah yang berhaluan revolusioner, kritis, dan independen.

Nama *Siasat* itu kemudian disepakati oleh keduanya. Warta sepekan ini kali pertama terbit pada 4 Juli 1947 di Jakarta. Merujuk kepada *masterhead*, disebutkan bahwa kantor redaksi terletak di Jalan Cikini No. 70, Jakarta Pusat, telepon 2799. Pengola redaksi *Siasat* terdiri dari Rosihan Anwar sebagai pemimpin

⁶ Bentuk fisik *Siasat* sendiri sebetulnya lebih menyerupai dengan apa yang sekarang kita sebut sebagai tabloid. Redaksi sendiri tak konsisten menyebut *Siasat* sebagai apa: majalah, mingguan, atau warta sepekan. Pada *logo-type* disebut “warta sepekan” namun pada *masterhead* mereka menamakan *Siasat* sebagai “Mingguan Politis, Ekonomis, Kulturel dan Sosial”. Namun Rosihan dalam *ibid.* hal. 55-65 menyebut *Siasat* sebagai majalah. Selanjutnya dalam tesis ini hanya akan disebut *Siasat* saja, namun bila diperlukan akan digunakan nama sesuai dengan *logo-typenya*.

⁷ Untuk kisah mengenai diskusi pendirian Majalah *Siasat* dikutip dari tulisan Budi Setiyono, *Bukan Rosihan Biasa* dalam situs Pantau, www.pantau.or.id. Baca juga M. Nursam, *op.cit.*, hal. 64

redaksi, diikuti oleh Soedjatmoko, Gadis Rasid dan A.B. Lubis sebagai dewan redaksi. Warta sepekan ini diterbitkan oleh Perusahaan Siasat. Tarif langganan ditetapkan seharga Rp 3,- per bulannya.

Dalam satu tulisannya di buku *Denyut Nadi Revolusi Indonesia* Rosihan Anwar mengenang cerita pendirian *Siasat* sebagai berikut:

Memang begitulah kenyataannya. Setelah menganggur beberapa waktu, tanggal 4 Januari 1947 saya bersama Soedjatmoko meluncurkan majalah politik dan budaya bernama “Siasat”. Dalam redaksi duduk Sutomo Satiman yang pernah satu sekolah di AMS-A Yogya dengan saya, Gadis Rasid, Abu Bakar Lubis. “Siasat” nomor pertama memuat tulisan Soedjatmoko mengenai “Kedudukan Indonesia – Batas gelanggang perjuangan”. Pada usia belum genap 25 tahun Soedjatmoko telah menuliskan wawasannya yang matang dan mendalam tentang perkembangan internasional yang dihadapi oleh Indonesia.⁸

Seperti yang dituturkan oleh Rosihan, pada nomor perdana itu, di halaman pertama, Soedjatmoko menulis sebuah artikel tentang tujuan dari revolusi Indonesia yang menurutnya untuk mendapatkan pengakuan luar negeri bagi kedaulatan Republik Indonesia. Dalam artikel yang berjudul “Kedudukan Indonesia: Batas gelanggang perdjuangan” itu dia juga memertanyakan siapakah yang menentukan sikap dunia internasional terhadap kedaulatan republik? Apakah Rusia yang bukan kapitalis ataukah Amerika dan Inggris yang kapitalis? Di antara kepentingan modal besar, kepentingan negara-negara kapitalis ini, demikian Soedjatmoko menulis, merupakan “Batas gelanggang perjuangan kita.

⁸ Rosihan Anwar, *Kenang-Kenangan Tentang Kehidupan Pers Indonesia di Masa Revolusi 1945-1949, dalam Op.Cit., hal. 61.*

Artikel perdana itu bukan saja memperlihatkan gagasan cemerlang tentang bagaimana seharusnya pemerintah republik bersikap, melainkan juga menunjukkan ketegasan pemihakan pengelola redaksi *Siasat* yang dalam hal ini diwakili oleh Soedjatmoko kepada republik di dalam percaturan politik saat itu. Ketegasan sikap dan pemihakan terhadap republik itu bukanlah suatu jalan yang tak penuh resiko. Pasukan NICA yang banyak berkeliaran di Jakarta merupakan ancaman yang bisa membahayakan keselamatan awak redaksi *Siasat* karena pemihakan mereka kepada republik. Dan ancaman itu menjadi kenyataan pada saat agresi militer pertama Belanda kantor redaksi *Siasat* di Cikini diduduki dan disita oleh tentara Belanda. Akibatnya *Siasat* berhenti terbit untuk beberapa lama.

Menarik pula untuk membandingkan apa yang ditulis oleh Soedjatmoko dengan pamflet politik Sutan Sjahrir, “Perdjoangan Kita”. Tampak sekali Soedjatmoko dipengaruhi oleh pemikiran tentang revolusi yang dikemukakan Sjahrir dalam pamfletnya itu. Pengaruh itu memang terasa pula sebagai sebuah “kebijakan” redaksi *Siasat* di awal periode berdirinya: bahwa mereka merupakan penganut sosialis dan pengikut Sjahrir. Hal itu bukannya tanpa dasar sama sekali, bahkan George McTurnan Kahin menyebut *Siasat* sebagai salah satu jurnal yang berorientasi sosialis yang paling berpengaruh di Indonesia saat itu.⁹

Dalam *Siasat* itu disajikan berita-berita sosial, politik, ekonomi dan budaya. Tentu saja orientasi pemberitaan *Siasat* sangat membela kepentingan

⁹ George McTurnan Kahin, *In Memoriam: Soedjatmoko, 1922-1989* dalam *Indonesia* (New York: Cornell University, 1990).

republik, sesuai dengan sikap yang ditunjukkan oleh Soedjatmoko di dalam artikel perdananya di *Siasat*. Namun demikian keberpihakan kepada republik itu membuat daya kritis *Siasat* hilang sama sekali. Karena tulisan-tulisan yang tegas dan keras memberikan kritik kiri kanan, maka dalam waktu singkat (tiga bulan) oplag *Siasat* mencapai 12 ribu, sesuatu yang luar biasa untuk ukuran masa itu.¹⁰

Sementara itu dalam soal budaya, patu pula diperhatikan tentang adanya satu lampiran kebudayaan “Gelanggang” yang dikelola oleh sastrawan-sastrawan terkemuka seperti Chairil Anwar, Rivai Apin, Asrul Sani, Ida Nasution dan Nuraini.

Lampiran kebudayaan itulah yang kemudian justru membuat *Siasat* semakin terkenal sebagai media massa yang banyak menampung gagasan intelektual-intelektual muda Indonesia pada zamannya. Diskusi-diskusi intelektual itu berujung pada polemik di media massa dan *Siasat* merupakan media massa yang banyak menampung polemik-polemik itu. Lampiran kebudayaan “Gelanggang” kemudian diambil alih oleh Soedjatmoko sendiri setelah Chairil Anwar meninggal dunia. Di ruang kebudayaan itu Soedjatmoko banyak menulis soal kebudayaan yang juga banyak mendapat tanggapan dari banyak pemikir saat itu, seperti polemiknya dengan Bujung Saleh yang dimuat secara berturut-turut di lampiran kebudayaan “Gelanggang” *Siasat*.

Dinamika *Siasat* sejak mulai berdiri sampai dengan berhenti terbit merupakan topik yang menarik untuk ditulis. Warta sepekan ini didirikan pada saat

¹⁰ Rosihan Anwar, *Kenang-Kenangan Tentang Kehidupan Pers Indonesia di Masa Revolusi 1945-1949, dalam Op.Cit., hal. 61.*

revolusi berlangsung, di mana situasi politik dan keamanan serba tak menentu. Ketegasan di dalam bersikap di pihak republik, tiada peduli terancam oleh agresor Belanda, menjadikan majalah ini unik. Keberadaan lampiran kebudayaan “Gelanggang” yang banyak menampung gagasan baru dalam soal sosial, kesenian dan budaya menambah keunikan yang dipunyai oleh *Siasat*.

Di dalam pengelolaannya, redaksi *Siasat* terdiri dari jurnalis-jurnalis beraliran sosialis. Seperti sudah disinggung di atas bahwa mereka adalah para simpatisan Partai Sosialis Indonesia. Namun demikian, khususnya dalam lampiran kebudayaan “Gelanggang”, ada juga tokoh yang dikenal berhaluan kiri dan dekat dengan Partai Komunis Indonesia, yakni Rivai Apin. Apa yang terjadi di *Siasat* sejak berdiri sampai dengan penghentian terbit pada 1957 merupakan cerminan dari keadaan politik yang berlaku pada saat itu. Pasca kemerdekaan Indonesia polarisasi kekuatan politik tidak sampai terseret jauh ke ruangan redaksi di setiap penerbitan. Ini berbeda dengan masa Demokrasi Terpimpin, di mana koran-koran dengan jelas menunjukkan sikap keberpihakannya kepada partai politik.

Semasa *Siasat* masih terbit, redaksi banyak menerima dan memuat tulisan dari berbagai penulis yang juga memiliki latar ideologi yang berbeda. Beberapa nama penulis yang rajin menulis di *Siasat* antara lain Pramoedya Ananta Toer, Sitor Situmorang dan Joebaar Ajoeb. Ketiga penulis ini kemudian dikenal berideologi kiri dan ditangkap pascaperistiwa G.30.S tahun 1965.

Siasat berhenti terbit pada bulan April 1957. Ada dua penyebab yang membuat *Siasat* berhenti terbit. Pertama adalah keluarnya beberapa pengasuh redaksi

ke tempat pekerjaan yang baru. Soedjatmoko menjadi anggota konstituante mewakili PSI, Rivai Apin mulai bergabung dengan Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra). Sementara itu Rosihan Anwar, pemimpin redaksi *Siasat*, banyak mencurahkan waktu dan pikirannya kepada harian *Pedoman*. Faktor kedua adalah biaya produksi yang tak bisa lagi dibayar. *Siasat* didirikan satu atap bersama dengan *Pedoman*. Pada saat bersamaan *Pedoman* naik tiras sedangkan *Siasat* mulai kehabisan energi karena pengelolanya mundur satu per satu. Akhirnya *Siasat*, dengan berat hati, ditutup pada April 1957.

B. Perumusan Masalah

Beberapa persoalan yang akan diangkat di dalam tesis ini antara lain bagaimana aktivitas *Siasat* di dalam mewarnai kehidupan intelektual Indonesia pascakemerdekaan. Polemik-polemik¹¹ yang terjadi di *Siasat*, terutama di dalam lembaran kebudayaan “Gelanggang” akan menjadi fokus perhatian penulisan tesis ini. Secara umum, polemik yang terjadi di beberapa media massa, khususnya di *Siasat*, menggambarkan kegairahan intelektual di dalam berkarya dan memikirkan masa depan Indonesia. Lantas bagaimana pula posisi *Siasat* di dalam kehidupan jurnalistik pada era itu. Tak kalah menariknya untuk mengangkat soal orientasi *Siasat* di dalam

¹¹ Salah satu polemik yang paling terkenal antara lain polemik Buyung Saleh dengan Soedjatmoko. Kumpulan karangan dalam rangka polemik itu telah dibukukan. Lihat M. Nursam, *Krisis daya cipta Indonesia : Polemik Soedjatmoko versus Boejoeng Saleh* (Yogyakarta : Ombak, 2004)

kebijakan redaksinya, tentang bagaimana mereka mengatur pemuatan berita dan tiap tulisan.¹²

Untuk melihat bagaimana posisi dan orientasi *Siasat*, akan dilakukan analisis terhadap isi berita dan tajuk yang dimuat di *Siasat*. Dalam penulisan ini, *Siasat* tidak dilihat sebagai sebuah fenomena yang berdiri sendiri, melainkan juga akan diletakkan dalam lansekap keadaan sosial dan politik secara luas. Artinya, *Siasat* sebagai media massa di mana para intelektual saat itu beradu ide, akan dihubungkan dengan jiwa zaman (*zeitgeist*) yang berkembang pada periode 1947 – 1957, di mana para intelektual banyak mengemukakan gagasannya mulai dari soal sosial, politik dan budaya yang bermuara kepada soal masa depan Indonesia.

Itu sebabnya tesis ini mengajukan judul posisi dan orientasi *Siasat* pada kurun tahun 1947 – 1950. Persoalan ini menarik karena pada tiga tahun pertama berdirinya *Siasat*, posisi *Siasat* berada di pihak republik yang otomatis orientasinya bersifat nasionalis; membela kepentingan Republik Indonesia. Posisi dan orientasi itu berubah mulai 1950 sampai dengan 1957, di saat Indonesia tak lagi berada di “Zaman Bersiap”. Dalam pada itu *Siasat* banyak mengangkat persoalan identitas kebangsaan; merumuskan tentang diri bangsa Indonesia dan beberapa soal lain yang berkenaan dengan pemikiran di bidang kebudayaan. Semua ini bisa dilihat dari beberapa tulisan yang dimuat di lembar kebudayaan “Gelanggang”.

¹² Seringkali rapat redaksi *Siasat* diadakan di rumah Soedjatmoko. Biasanya rapat itu juga diselingi dengan diskusi yang dihadiri para intelektual. Lihat H.B. Jassin, *Surat-Surat 1943 – 1983* (Jakarta: Gramedia, 1984) hal. 97.

C. Lingkup Penelitian

Dalam penulisan tesis ini akan dibahas mengenai dinamika dan aktivitas *Siasat* semasa terbit, mulai dari tahun 1947 sampai dengan 1957. Tahun 1947 adalah awal munculnya majalah *Siasat*, sedangkan tahun 1957 merupakan berakhirnya masa terbit *Siasat*. Pada tahun 1957 setelah *Siasat* tutup, terbit majalah lain, yakni *Siasat Baru*. Namun kepengurusan majalah tersebut tak lagi dikelola oleh mereka yang tergabung di dalam *Siasat*.

Secara topikal penulisan tesis ini membahas mengenai majalah *Siasat*, tentang bagaimana mereka mengambil bagian dalam situasi Indonesia di masa revolusi dan di masa-masa setelahnya sampai dengan tahun 1957. Pembahasan di dalam tesis akan berkisar tentang keadaan pers secara umum, khususnya pada periode revolusi (1945-1950) kemudian dilanjutkan dengan periode percobaan demokrasi pada 1950 – 1957.

Pembagian dua periode, yakni periode 1947 – 1950 dan 1950 – 1957 dikarenakan orientasi *Siasat* yang disesuaikan dengan kondisi yang melingkupinya saat itu. Pada periode pertama *Siasat* berada di dalam suasana revolusi di mana Indonesia memasuki kondisi yang serba tak menentu. Belanda mencoba untuk menjajah kembali, pemerintahan republik pindah ke Yogyakarta sementara redaksi *Siasat* tetap berada di Jakarta. Dalam periode tersebut *Siasat* lebih banyak memosisikan diri sebagai media masa republik yang secara gencar mengkritik Belanda. Memasuki periode kedua, 1950 – 1957, *Siasat* memosisikan diri sebagai media massa yang berperan aktif di dalam gagasan membangun Indonesia. Hal itu

bisa tampak dari berbagai polemik dan karangan-karangan yang disiarkan di *Siasat* yang mencerminkan alam pikiran para intelektual saat itu.

D. Tujuan Penelitian

Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pers dengan penguasa. Dalam hal *Siasat*, hubungan dengan penguasa dibagi ke dalam dua periode, yakni periode kekuasaan Belanda dan pemerintah Republik Indonesia. Penelitian ini diharapkan bisa mengungkapkan bagaimana hubungan pers *republikein* dengan pihak Belanda di daerah pendudukan dalam kaitannya dengan propaganda republik melawan Belanda.

Rosihan Anwar dan Soedjatmoko diketahui merupakan dua intelektual yang memiliki relasi dengan Partai Sosialis Indonesia. Penulisan ini hendak mengungkapkan sejauh mana pengaruh hubungan dengan Partai Sosialis Indonesia bisa mempengaruhi orientasi pemberitaan di dalam *Siasat*, khususnya pada periode Indonesia merdeka. Mengetahui dinamika pers di dalam masa demokrasi liberal dan melihat sejauh mana peran *Siasat* sebagai pers kontrol sosial pada masanya.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk menampilkan suatu gambaran yang utuh tentang peristiwa sejarah yang terjadi, diperlukan suatu studi pustaka yang sifatnya komprehensif, sehingga didapatkan informasi dan data yang mendukung serta memperkuat sebuah karya penulisan sejarah.

Studi pustaka ini dilakukan baik terhadap buku-buku, majalah, dan surat kabar-surat kabar yang sezaman maupun yang ditulis setelah terjadinya suatu peristiwa. Telaah itu berfungsi untuk mengungkap peristiwa yang terjadi dengan seteliti mungkin, dengan harapan mendekati objektivitas, dan pembahasan yang kronologis.

Adapun tinjauan buku, majalah, dan surat kabar yang terbit setelah peristiwa terjadi, berfungsi untuk membahas dan membandingkan peristiwa yang hendak ditampilkan, sehingga didapatkan hubungan yang bersifat mendasar. Dari semua hal tersebut di atas akan didapatkan banyak data dan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan.

Beberapa publikasi pemerintah yang berkaitan dengan permasalahan pers sangat membantu dalam penulisan ini. Salah satunya adalah *Almanak Pers Indonesia 1954-1955*¹³ yang berisi artikel-artikel tentang pers dan perkembangannya, serta juga memuat informasi mengenai keadaan pers pada tahun-tahun tersebut, seperti peraturan-peraturan, jumlah surat kabar, oplah, sirkulasi, dan pengimporan kertas. Publikasi yang lainnya adalah *Kronik Pers 1957*¹⁴ yang berisi mengenai peristiwa-peristiwa dan kasus-kasus yang terjadi di dunia pers pada tahun tersebut. Untuk memperdalam pembahasan mengenai *Siasat* kiranya perlu referensi orang yang

¹³ Departemen Penerangan, *Almanak Pers Indonesia 1954-1955*, (Jakarta: Departemen Penerangan, 1955).

¹⁴ Lembaga Pers dan Pendapat Umum, *Kronik Pers 1957*, (Yogyakarta: Lembaga Pers dan Pendapat Umum, 1959).

berada di belakang warta sepekan tersebut, apalagi saat itu berkembang istilah *personal journalism* dimana surat kabar sulit dipisahkan dari pengasuhnya. Buku *Menulis Dalam Air, Sebuah Otobiografi*¹⁵ sangat memperkaya pembahasan dalam penulisan ini. Dalam buku ini bisa diperoleh gambaran perjalanan hidup, pengalaman-pengalaman, dan pemikiran-pemikiran, serta misi dan visi politik Rosihan Anwar, terutama dalam bidang pers.

Atas dasar alasan yang sama juga digunakan biografi Soedjatmoko, *Pergumulan Seorang Intelektual*¹⁶. Dalam biografi ini diperoleh kisah mengenai perjalanan hidup Soedjatmoko dan peranannya di dalam pendirian dan pengelolaan *Siasat*. Buku lainnya yang berhubungan dengan Soedjatmoko antara lain *Etika Pembebasan, Pilihan Karangan tentang: Agama, Kebudayaan, Sejarah dan Ilmu Pengetahuan*¹⁷ dan *Dimensi Manusia dalam Pembangunan: Pilihan Karangan*¹⁸. Dari dua buku tersebut dapat dibaca mengenai pemikiran Soedjatmoko, terutama sekali yang dimuat di *Siasat*. Sebagian besar tulisannya yang dimuat pada buku itu adalah karangan yang ditulis untuk menangkis lawan-lawan polemiknya di *Siasat*.

¹⁵ Rosihan Anwar, *Menulis Dalam Air, Sebuah Otobiografi*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1983).

¹⁶ M. Nursam, *Pergumulan Seorang Intelektual: Biografi Soedjatmoko* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002)

¹⁷ Soedjatmoko, *Etika Pembebasan, Pilihan Karangan tentang: Agama, Kebudayaan, Sejarah dan Ilmu Pengetahuan* (Jakarta: LP3ES, 1984). Disuting oleh Aswab Mahasin, Sabam Siagian dan Ignas Kleden.

¹⁸ Soedjatmoko, *Dimensi Manusia dalam Pembangunan: Pilihan Karangan* (Jakarta: LP3ES, 1983)

Dengan demikian dapat diketahui bagaimana dinamika *Siasat* pada saat Soedjatmoko mewarnai kebijakan redaksi.

Buku yang juga menjadi rujukan adalah *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia* karya Abdurachman Soerjomihardjo¹⁹. Buku ini menuliskan perkembangan pers di Indonesia sejak zaman kolonial hingga zaman Orde Baru. Dalam beberapa hal karya Soerjomihardjo ini memiliki kredibilitas yang baik sehingga wajib dijadikan rujukan.

Buku yang lain adalah *H. Rosihan Anwar, Wartawan dengan Aneka Citra*²⁰, melengkapi gambaran mengenai pribadi Rosihan. Buku ini merupakan kumpulan tulisan dari teman-teman dekat Rosihan, dan beberapa orang di antaranya pernah menjadi pengasuh *Siasat*. Dalam buku ini juga dimuat banyak informasi mengenai pertumbuhan dan perkembangan *Siasat* sampai kebangkrutan yang dialaminya, serta juga memuat artikel-artikel Rosihan Anwar.

Buku-buku di atas ditampilkan sebagai bahan telaah pustaka yang mempunyai relevansi dengan tesis ini. Tesis ini juga menggunakan referensi lain yang menggambarkan kondisi sosial-politik masa itu. Dengan menelaah buku-buku tersebut dapat diperdalam pemahaman tentang perkembangan pers di Indonesia pada kurun tahun 1947 - 1957, khususnya mengenai *Siasat*.

¹⁹ Abdurachman Soerjomihardjo, *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Kompas, 2003)

²⁰ Tribuana Said, H. Rosihan Anwar, *Wartawan dengan Aneka Citra*, (Jakarta: Harian Kompas, 1992).

F. Metode Penelitian dan Penggunaan Sumber

Dalam penulisan sejarah tidak dapat begitu saja merangkai data-data yang diperoleh dari suatu peristiwa. Oleh karena itu perlu digunakan metode untuk merekonstruksi masa lampau yaitu proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman atau peninggalan masa lampau²¹.

Penulisan sejarah kritis dimaksudkan agar penulisan mendekati peristiwa yang sebenarnya atau paling tidak mendekati unsur-unsur objektivitas. Penggunaan metode secara kritis dilakukan melalui empat tahapan. Pada tahapan pertama dilaksanakan aktivitas pengumpulan sumber atau heuristik, baik sumber primer maupun sekunder. Pengumpulan sumber ini sangat penting guna memperoleh data yang dibutuhkan. Pada tahapan kedua dilaksanakan kegiatan analisa sumber melalui dua macam kritik, yaitu kritik ekstern dan kritik intern²². Kritik ekstern penting dilakukan untuk mengetahui otentisitas atau keaslian sumber. Adapun kritik intern sangat penting untuk menentukan apakah sumber yang digunakan kredibel, dapat dipercaya, atau tidak.

Tahap ketiga adalah mengadakan sintesa fakta, yaitu membuat hubungan antara fakta yang sama dan sejenis. Dalam tahap sintesa ini peranan imajinasi sangat besar karena imajinasi membantu sejarawan dalam merekat fakta yang disintesa. Selain berimajinasi, sejarawan perlu pula mengadakan interpretasi. Di sini fakta yang

²¹ Louis Gottschalk, . Terjemahan Nugroho Notosusanto, *Mengerti Sejarah*, cet. ke-5, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 32.

²² *Ibid.*, hlm. 80-117.

disintesis dan diinterpretasi dalam bentuk kata-kata dan kalimat, sehingga dapat dibaca dan dimengerti. Tahap keempat adalah mengadakan penulisan atau historiografi. Dalam tahapan ini fakta yang sudah disintesis dan dianalisa harus dipaparkan dalam bentuk tulisan.

Siasat menjadi sumber utama dengan menganalisa isi berita, dan tajuk rencananya. Sumber ini memberi banyak gambaran tentang aktivitas *Siasat* sendiri, dan juga memberi informasi mengenai kondisi sosial-politik, kehidupan pers secara umum, dan sikap serta tindakan pemerintah, dalam hal ini Belanda, terhadap *Siasat*. Hal itu sesuai dengan sifat surat kabar yang objektif dan aktual.

Di samping *Siasat*, juga digunakan sumber-sumber primer; seperti dokumen, instruksi pemerintah, dan sejumlah surat kabar yang sezaman. *Siasat* dapat ditemukan di Perpustakaan Nasional, Jakarta dan Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin di kompleks Taman Ismail Marzuki, Jakarta.

Oleh karena itu penulis juga mencari data melalui metode sejarah lisan terhadap sejumlah informan yang mengetahui, baik langsung maupun tidak langsung. Data yang diperoleh melalui metode wawancara, kemudian dipakai untuk mendukung, melengkapi maupun membandingkan data yang sudah ada. Namun sayang sampai detik-detik terakhir penyelesaian penulisan tesis ini, narasumber utama yakni Rosihan Anwar belum bersedia ditemui dengan berbagai alasan. Kendati demikian persoalan tersebut dapat teratasi mengingat Rosihan telah menuliskan kisah perjalanan hidupnya dan juga semua hal yang dilakukannya, termasuk soal *Siasat* di dalam otobiografi dan beberapa karyanya yang lain.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terbagi menjadi lima bab. Secara berurutan kelima bab tersebut akan dijabarkan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang dan permasalahan, ruang lingkup, telaah pustaka, kerangka teoritis dan pendekatan, metode penelitian dan penggunaan sumber serta sistematika.

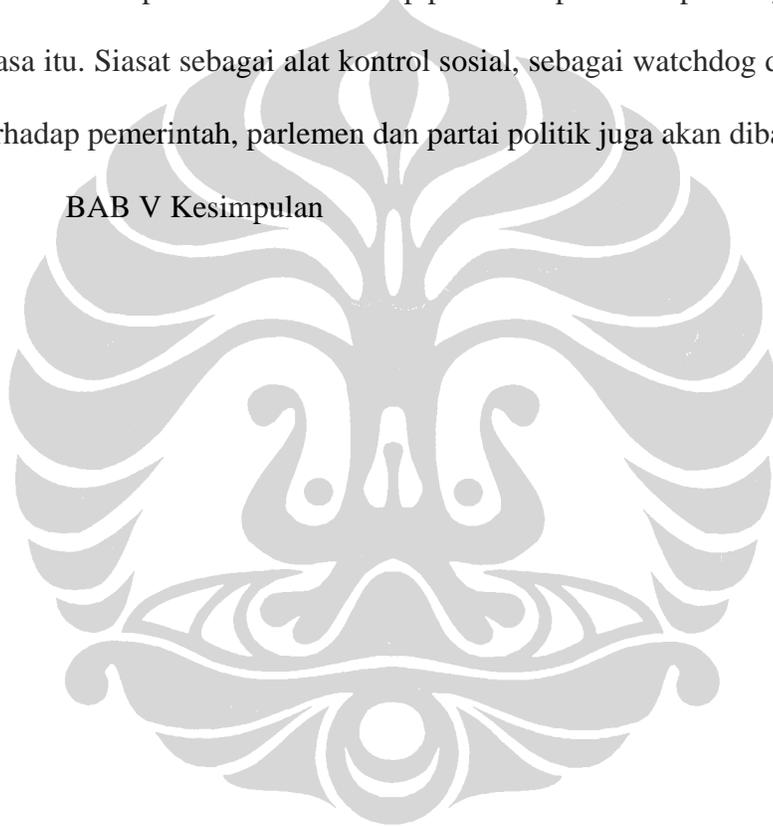
BAB II membahas perkembangan pers secara umum pada masa revolusi (1947-1950) dan masa percobaan demokrasi (1950 – 1957), termasuk di dalamnya situasi sosial-politik Indonesia yang berlangsung saat itu. Dalam Bab II ini juga akan dibahas fenomena pers revolusi, khususnya *Siasat*, yang dihadapkan pada dua pilihan: berpihak kepada republik atau Belanda. Bab ini juga membahas sejarah perkembangan *Siasat* sejak kelahirannya, peranan Rosihan Anwar, Soedjatmoko termasuk beberapa pengasuh redaksi lainnya, usaha mengembangkan perusahaan, dan sikap politik keredaksian yang diambil *Siasat* sejak pada masa revolusi sampai dengan berakhirnya masa terbit *Siasat* tahun 1957.

BAB II membahas perkembangan pers secara umum pada masa revolusi (1947-1950) dan masa percobaan demokrasi liberal (1950-1957), termasuk di dalamnya situasi sosial politik Indonesia yang berlangsung saat itu. Dalam Bab II ini juga akan dibahas fenomena pers revolusi, khususnya *Siasat*, yang dihadapkan pada dua pilihan: berpihak kepada republik atau Belanda. Bab ini juga membahas sejarah perkembangan *Siasat* sejak kelahirannya, peranan Rosihan Anwar, Soedjatmoko

termasuk beberapa pengasuh redaksi lainnya, usaha mengembangkan perusahaan, dan sikap politik yang ditempuh *Siasat* tahun 1957.

BAB III membahas politik redaksi *Siasat*, rubrikasi dan membahas persoalan politik dalam negeri melalui rubrik tajuk, Tanah Tumpah Darah. BAB IV membahas orientasi dan posisi *Siasat* terhadap peristiwa-peristiwa politik yang berkembang pada masa itu. *Siasat* sebagai alat kontrol sosial, sebagai watchdog dan posisi dan orientasi terhadap pemerintah, parlemen dan partai politik juga akan dibahas dalam bab ini.

BAB V Kesimpulan



BAB II

Gambaran Umum Pers di Indonesia Masa Revolusi dan Lahirnya Warta Sepekan *Siasat*

A. Keadaan Pers di Zaman Revolusi

Pada akhirnya, Indonesia merdeka. 17 Agustus 1945, meminjam konsep Alain Badiou, adalah *l'évenement* (kejadian) yang bersifat tunggal, yang memutus hubungan dengan sejarah²³. Sebelum proklamasi kemerdekaan, Indonesia dikuasai oleh Jepang 3,5 tahun dan Belanda selama kurang lebih tiga abad. 17 Agustus 1945 adalah awal dari sejarah Indonesia yang merdeka yang sepenuhnya tak lagi berada di bawah kekuasaan negeri penjajah mana pun.

Revolusi yang menjadi alat tercapainya kemerdekaan bukan hanya kisah sentral dalam sejarah Indonesia., melainkan merupakan unsur yang kuat dalam persepsi bangsa Indonesia tentang dirinya sendiri. Semua usaha yang tidak menentu untuk mencari identitas-identitas baru, untuk persatuan dalam menghadapi kekuasaan asing, dan untuk tatanan sosial yang lebih adil tampaknya akhirnya membuahkan hasil pada masa-masa sesudah Perang Dunia Kedua. Untuk yang pertama kalinya di

²³ Alain Badiou, *Ethics*. Terjemahan Oliver Feltham. (London: Verso, 2001). Hal. 42

dalam kehidupan kebanyakan rakyat Indonesia, segala sesuatu yang serba paksaan yang berasal dari kekuasaan asing hilang secara tiba-tiba.²⁴

Dalam bidang pers, revolusi kemerdekaan Indonesia merupakan anugerah tersendiri bagi para wartawan Indonesia yang semenjak zaman kolonial sampai dengan pendudukan Jepang tak pernah menghirup udara kebebasan pers. Kontrol terhadap pers dilakukan teramat kuat. Hampir tak ada celah untuk melakukan kritik; kalau pun dilakukan segala konsekuensi yang ditimbulkan akibat kritik tersebut mau tak mau harus ditanggung oleh pengelola redaksi.

Suasana revolusi seperti yang digambarkan oleh M.C. Ricklefs tersebut memang merupakan alam baru; suasana yang dipenuhi kebebasan dan bahkan euforia yang acapkali berlebihan dan berhilir kepada konflik-konflik sengit di antara kekuatan-kekuatan sosial di dalam masyarakat. Suasana euforia akibat kemerdekaan pun berlangsung di kalangan para wartawan. Sebagian dari mereka melakukan aksi-aksi mendirikan surat kabar sendiri, dengan semangat kemerdekaan.

Aksi-aksi mendirikan surat kabar itu disebabkan karena walaupun proklamasi kemerdekaan telah dikumandangkan, dan pekik merdeka telah jadi salam di mana-mana, pada kenyataannya penguasa Jepang masih menguasai keadaan. Padahal pada saat itu Jepang telah bertekuk lutut menyerah kepada Sekutu. Bahkan *Gunseikanbu* (Pemerintah militer Jepang) pada 5 September 1945 mengeluarkan

²⁴ M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern, 1200-2004* (Jakarta: Serambi, 2004). Hal. 428.

pengumuman yang melarang penyiaran berita atau karangan yang menyebutkan bahwa negara Indonesia sudah ada dan merdeka.²⁵

Untuk merespon keadaan itu sejak 3 September 1945 wartawan-wartawan yang bekerja di kantor berita milik pemerintah pendudukan Jepang, *Domei*, mendirikan kantor berita Antara. Kantor berita ini sebetulnya telah didirikan sejak 13 Desember 1937 oleh Adam Malik, Soemanang, A.M. Sipahoetar dan Pandoe Kartawigoena. Namun ketika Jepang menduduki Indonesia *Antara* ditutup. Jepang kemudian mendirikan *Domei*, kantor berita yang sebagian besar karyawannya adalah pegawai *Antara*. Setelah *Antara* kembali berdiri, mereka menyiarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 ke seluruh penjuru dunia.

Langkah riskan yang penuh bahaya untuk menyiarkan kemerdekaan Indonesia dan sekaligus menjadi surat kabar republikain bukan saja ditempuh oleh Adam Malik dan kawan-kawan dengan Antaranya. Pada 6 September 1945 sekelompok siswa STM dan mahasiswa seperti Soeraedi Tahsin, Mohammad Sjaaf, Rusli Amran, Abu Bakar Lubis menerbitkan surat kabar *Berita Indonesia*. Penerbitan *Berita Indonesia* menandai lahirnya surat kabar republikain pertama. Kendati demikian *Berita Indonesia* terbit tak teratur karena kesukaran kertas dan percetakan,

²⁵ Rosihan Anwar, *Kenang-Kenangan tentang Kehidupan Pers Indonesia Zaman Revolusi*. Dimuat dalam Panitia Konferensi Internasional. *Denyut Nadi Revolusi Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1997) Hal. 55 - 65

oleh karenanya surat kabar ini lebih cenderung beredar di bawah tanah atau *underground paper*.²⁶

Pada 1 Oktober 1945, sekelompok wartawan dan karyawan yang pada masa pendudukan Jepang bekerja pada harian *Asia Raya* mengambil alih percetakan Belanda *De Unie*. Pada zaman Belanda percetakan itu mencetak surat kabar *De Java Bode*, era pendudukan Jepang mencetak koran *Asia Raya*, majalah *Djawa Baroe* dan *Jawa Shimbun*. Para wartawan dan karyawan itu kemudian menempelkan pamflet yang bertuliskan “milik Repoeblik Indonesia” di pintu gedung percetakan *De Unie*.

Aksi perebutan percetakan itu, seraya menempelkan pamflet “milik Repoeblik Indonesia” menegaskan tumbuhnya perasaan nasionalisme di kalangan wartawan. Sebuah perasaan yang telah bermetamorfosa semenjak masa pergerakan nasional. Kehadiran pers republik pada saat yang bersamaan menandakan eksistensi sebuah negara-bangsa yang baru.

Selain Berita Indonesia dan Merdeka, menyusul terbit surat kabar lain yang juga berhaluan sama. Sjamsuddin Sutan Makmur, wartawan yang telah bekerja sejak zaman Belanda dan pada zaman Jepang bekerja pada *Gun Kenetsu Han* (kantor sensor balatentara pendudukan Jepang) mendirikan surat kabar *Rakjat*. Sjamsuddin kemudian menjabat sebagai menteri penerangan pada era tahun 1950-an. Di dalam *Rakjat*, juga bekerja Usmar Ismail, tokoh perfilman nasional. *Rakjat* tak sempat bertahan lama karena satu per satu pengelola redaksinya turut mengungsi ke Yogyakarta.

²⁶ *Ibid.*, Hal. 58

Keadaan Jakarta memang sedang genting. Awal 1946 bala tentara NICA datang ke Jakarta dengan mendompleng pasukan sekutu. Mereka kemudian menguasai Jakarta dan seringkali mengganggu ketenteraman. Acapkali juga mereka bertindak brutal dan melancarkan aksi-aksi penculikan terhadap tokoh-tokoh penting republik. Salah satu tokoh yang diculik adalah Suwiryo, walikota Jakarta. Ia disepak selama lima bulan oleh tentara NICA.

Menghadapi keadaan seperti itu pemuda Indonesia tak mau diam berpangku tangan, mereka pun melakukan serangan balas. Pertempuran pun tak dapat dielakkan. Dalam peristiwa Tanah Tinggi, Laskar Rakyat terlibat bentrokan dengan serdadu NICA. Cornel Simanjuntak, salah seorang pemimpin Laskar Rakyat tewas seketika dalam pertempuran itu. Korban kebrutalan NICA lainnya adalah Rahman Zakir, mahasiswa kedokteran, yang tewas ditembak NICA dalam peristiwa Kramat-Senen pada 8 Desember 1945.²⁷

Sasaran tembak NICA pun semakin gencar diarahkan kepada tokoh republik. Pada penghujung Desember 1945, Sutan Sjahrir dicegat dan ditodong oleh serdadu NICA. Mata kanan Sjahrir lebam dipukul salah seorang serdadu. Menteri Penerangan Amir Sjarifuddin juga hampir tewas di tangan serdadu NICA, namun ia selamat dari percobaan pembunuhan tersebut. Keadaan yang semakin tak menentu itu membuat Soekarno dan Mohammad Hatta harus mengungsi ke Yogyakarta. Pada pukul 18:00 petang, 6 Januari 1946, mereka mengungsi ke Yogyakarta dengan

²⁷ *Op.cit.*, Hal. 58 – 59

menggunakan kereta api yang dipadamkan lampunya. Khawatir ditangkap serdadu NICA.

Kembalinya Belanda ke Indonesia bukan semata memanggul senjata. Mereka pun menyiapkan strategi perang infomasi sebagai bagian dari *psywar*. Untuk alasan itu Jawatan Penerangan Belanda (*Regerings Voorlichtings Dienst*, RVD) menerbitkan majalah *Het Uitzicht* 16 Januari 1946. Majalah ini menyuarakan propaganda Belanda yang tentu saja berisi alasan pembenaran buat keberadaan Belanda di Indonesia.

Untuk menangkis dan mengimbangi pemberitaan *Het Uitzicht*, pada 23 Januari 1946 Kementrian Penerangan Republik Indonesia di bawah Menteri Amir Sjarifuddin mendirikan *Het Inzicht*. Pemimpin Redaksi pertama Mr. Asmaun. Namun tak lama setelah itu posisi Asmaun digantikan oleh Soedjatmoko.²⁸

Ketika Belanda melancarkan aksi militer pertama 21 Juli 1947, seluruh surat kabar republikein yang berada di Jakarta dibredel dan kantor redaksinya diduduki oleh tentara Belanda. Beberapa wartawan pro republik pun, seperti Rosihan Anwar, dijebloskan ke penjara Bukit Duri. Koran Merdeka milik BM Diah pun tak luput dari sasaran kebrutalan tentara Belanda. Koran itu berhenti terbit, namun tak beberapa lama kemudian, beserta Mochtar Lubis dan Asa Bafaqih, Diah menerbitkan surat kabar dengan nama baru, *Masa*.

²⁸ M. Nursam, *Pergumulan Seorang Intelektual: Biografi Soedjatmoko*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002) Hal. 64

Paling tidak selama empat tahun setelah proklamasi, surat kabar yang dibidani oleh wartawan Indonesia dan berhaluan republikan muncul di pelbagai daerah. Selain karena semangat kemerdekaan, keputusan politik pemerintah republik yang dituangkan ke dalam Maklumat 3 November 1945²⁹ yang ditandatangani oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta semakin menambah marak usaha penerbitan. Dalam maklumat itu pemerintah menganjurkan agar rakyat membentuk partai-partai politik. Partai-partai yang berdiri tersebut pada saat yang bersamaan juga memiliki media massanya masing-masing sebagai corong propagandanya.

Di Jakarta terbit majalah *Mimbar Indonesia* yang dikelola oleh Soekardjo Wirjopranoto, Prof. Soepomo, Adinegoro, HB Jassin dan Darsjaf Rachman. Albert Manoempak Sipahoetar, pendiri Antara, kemudian mendirikan sebuah surat kabar di Sukabumi. Andjar Asmara, sutradara yang juga wartawan mendirikan koran *Perdjoangan* di Purwakarta. Di Tasikmalaya terbit harian *Suara Merdeka*, *Kedaulatan Rakyat* di Yogyakarta. Di Yogyakarta pula, tokoh film nasional Usmar Ismail mendirikan mingguan *Patriot*. Sementara itu di Magelang berdiri koran *Penghela Rakyat* dan Surabaya, *Suara Rakyat*.

²⁹ Bunyi maklumat yang dinamai Maklumat Pemerintah 3 November 1945: 1) Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik, karena dengan adanya partai-partai itulah dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala aliran paham yang ada dalam masyarakat. 2) Pemerintah berharap supaya partai-partai itu telah tersusun sebelum dilangsungkan pemilihan anggota Badan-badan Perwakilan Rakyat. Pemilihan ini diharapkan dapat dilakukan pada bulan Januari 1946.

Belanda pun tak mau kalah saing dengan maraknya media massa pro republik. Mereka mengusahakan pendirian majalah dan surat kabar berbahasa Indonesia yang mendukung politik pemerintah Belanda di Indonesia. pada 1946 pemerintah Belanda mendirikan majalah *Pandji Rakjat*. Majalah ini dipimpin oleh Syed Almasawa, seorang wartawan keturunan Arab Palembang yang merantau ke luar negeri. Dia kembali ke Indonesia setelah Perang Dunia Kedua dan bekerja sebagai pegawai NICA. Selain menerbitkan surat kabar *Het Uitzicht* yang berbahasa Belanda, RVD juga menerbitkan harian *Fadjar* yang dipimpin oleh Haris Sitompoel.

Koran-koran yang berafiliasi dengan partai, sebagai dampak dari Maklumat Wakil Presiden 3 November 1945 pun bermunculan. Surat kabar *Pacific*, *Murba* dan *Guntur* didirikan di Solo sebagai afiliasi Gerakan Revolusi Rakjat (GRR) yang dipimpin Tan Malaka. Kelompok sayap kiri pun memiliki surat kabar sendiri seperti *Bekerja* dan *Bangun*. Di Yogyakarta, pada 1948, kelompok Tan Malaka pun mendirikan surat kabar *Massa*. Sementara kelompok Masyumi mendirikan *Suara Umat*.³⁰

Masing-masing surat kabar itu saling menyerang dalam pemberitaannya. Mereka membawa politik redaksinya masing-masing dan tak jarang perselisihan pun berujung pada perkelahian fisik, bahkan bersenjata. Konflik bersenjata terutama terjadi pada saat masing-masing surat kabar itu memperebutkan percetakan. Namun demikian, kendati koran-koran itu bertarung satu sama lain, pada saat Belanda

³⁰ Rosihan Anwar, *Menulis Dalam Air, Sebuah Otobiografi*. (Jakarta: Sinar Harapan, 1983) Hal. 173 - 175

melancarkan agresi militer kedua pada bulan Desember 1948 surat kabar afilial partai politik itu justru bersatu menghadapi Belanda.

Koran-koran tersebut terbit bawah tanah dan terus menyiarkan berita yang berpihak kepada republik. Kendati diterbitkan dalam bentuk stensilan, koran-koran republik itu memberi semangat pada pejuang republik dan secara berkala memberitakan bahwa Republik Indonesia masih eksis.

Perasaan nasionalisme dari koran-koran republik itu tak lain merupakan cerminan semangat zaman yang berkembang pada masa revolusi. Perasaan itu telah berakar di dalam jiwa rakyat dan tak lain hasil dari tempaan pemimpin nasionalis Indonesia selama kurang lebih tiga dekade. Satu hal yang perlu digarisbawahi bahwa tradisi koran yang berafiliasi dengan partai politik yang dimulai sejak zaman revolusi itu ternyata terus berlangsung hingga masa Demokrasi Terpimpin dan berlanjut sampai akhir pemerintahan Orde Lama. Namun bersamaan dengan penyederhanaan partai-partai oleh Orde Baru, koran afilial partai cuma cerita sejarah. Dan kalau pun ada, koran tersebut milik organisasi mesin politik Orde Baru.

B. Terbitnya Warta Sepekan *Siasat*

Bulan Juli 1946, digelar konferensi Malino di Makassar. Sponsor utama konferensi itu adalah Letnan Gubernur Jenderal Dr H.J. Van Mook. Konferensi itu memiliki tujuan utama untuk menjadikan wilayah Indonesia terpecah belah menjadi negara-

negara kecil yang berbentuk federasi.³¹ Dengan demikian Belanda bisa secara mudah menguasai Indonesia sekaligus dengan semua sumber ekonomi yang sebelum perang dimiliki Belanda.

Ada tiga wartawan republik yang turut meliput konferensi tersebut: Soedjatmoko dari majalah *Het Inzicht*, Rosihan Anwar dari *Merdeka* dan Rinto Alwi dari *Ra'jat*. Ketiga wartawan tadi menginap di Oranje Hotel, Makassar. Soedjatmoko dan Rosihan Anwar berada di bungalow yang sama. Hubungan antara Soedjatmoko dengan Rosihan terbina sejak saat itu. Mereka banyak berdiskusi; bertukar pikiran tentang segala soal, mulai dari filsafat, politik sampai dengan urusan pers. Diskusi antara keduanya bisa terjadi di mana pun, bahkan di kakus yang letaknya di atas kali kecil yang airnya mengalir deras.

Dari kakus itu pula muncul gagasan untuk mendirikan sebuah majalan politik dan kebudayaan, yang kelak diberi nama *Siasat*. Baik Rosihan maupun Soedjatmoko merasa bosan dengan berita propaganda yang dilancarkan oleh jawatan penerangan Belanda. Rosihan Anwar berpendapat pada masa itu sudah saatnya terbit majalah yang bisa digunakan sebagai sarana pendirian politik masyarakat.³²

Gagasan mendirikan majalah itu memang tak segera dilakukan. Soedjatmoko masih bekerja di *Het Inzicht*, sementara Rosihan bekerja di *Merdeka*. Rosihan kemudian keluar dari *Merdeka* pada 8 Oktober 1946 karena berselisih paham

³¹ Nugroho Notosutanto *et.al.*, *Sejarah Nasional Indonesia* jilid. VI (Jakarta: Balai Pustaka, 1993) Hal. 129

³² Budi Setiyono, *Bukan Rosihan Biasa*. Dimuat di *Majalah Pantau*, edisi Agustus 2003.

dengan BM Diah. Ia pun keluar dari Merdeka dan bekerja sebagai ajudan yang dipekerjakan buat Lord Killearn dalam perundingan Linggarjati. Setelah tak lagi bekerja sebagai ajudan, Desember 1946, Rosihan disibukkan oleh urusan persiapan penerbitan majalah politik dan budaya yang pada beberapa bulan sebelumnya didiskusikan bersama Soedjatmoko.

Dengan bermodalkan beberapa rim kertas yang diperkirakan cukup untuk empat kali terbitan oplag 3 ribu eksemplar dan sejumlah 3.000 ORI (Oeang Republik Indonesia) yang diberikan dari Kementerian Penerangan RI, maka pada 4 Januari 1947 terbitlah mingguan *Siasat* dengan format tabloid 12 halaman. Tenaga redaksi terdiri dari lima orang dan empat orang pegawai tatausaha. Pemimpin redaksi dijabat oleh Rosihan Anwar. Soedjatmoko, Gadis Rasid, Sutomo Satiman dan Abu Bakar Lubis masuk sebagai dewan redaksi. Kantor redaksi terletak di Jalan Cikini No. 70. Perusahaan penerbit sama seperti nama majalah: *Siasat*. Harga berlangganan ditetapkan Rp. 3 per bulan. Pada masterhead (kolom nama-nama pengasuh redaksi) disebutkan bahwa *Siasat* adalah mingguan politik, ekonomi, kultureel dan sosial.³³

Pada edisi perdananya *Siasat* menurunkan tulisan Soedjatmoko, “Kedudukan Indonesia – Batas Gelanggang Perdjoangan”. Beberapa edisi selanjutnya *Siasat* menurunkan tulisan-tulisan yang tidak kalah berlian dan inteleknnya: Soedjatmoko kembali menurunkan tulisan, “Merenoengkan Asia: Kisah Seboeah Perdjalan”. Tulisan tersebut merupakan laporan perjalanan Soedjatmoko ketika mendampingi PM Sjahrir ke india. Sutomo Satiman menulis artikel tentang Vietnam,

³³ Rosihan Anwar dalam loc.cit., Hal 161.

Soedarpo Sastrosatomo mengenai persoalan yang terjadi di Jerman dan Gadis Rasid menurunkan wawancara eksklusif dengan Menteri Pengajaran Mr. Soewandi. *Siasat*, seperti kesepakatan awal antara Soedjatmoko dengan Rosihan Anwar, tak hanya mengangkat berita politik melainkan juga tulisan-tulisan mengenai kebudayaan. Dalam edisi perdana Nursyamsu menulis kisah berjudul “Laziman” dan penyair terkemuka Chairil Anwar mengangkat tema tulisan kebudayaan “3 Muka 1 Pokok”.

Karena *Siasat* gencar melancarkan kritik dan seringkali tulisan-tulisannya menyerang kepada pihak Belanda, maka masyarakat yang pada saat itu memang dipengaruhi suasana revolusi memilih *Siasat* sebagai bahan bacaan. Selain mampu menangkap kecenderungan zaman, *Siasat* juga tampil sebagai koran intelektual. Kontan saja *Siasat* laku keras. Dalam waktu tiga bulan semenjak didirikannya, oplag *Siasat* terdongkrak naik, dari semula yang hanya dicetak 3.000 eksemplar, naik jadi 12.000 eksemplar.

Di dalam *Siasat* terdapat ruang kebudayaan *Gelanggang* yang diasuh oleh tiga seniman terkemuka: Asrul Sani, Siti Nurani dan Chairil Anwar. Setelah Chairil Anwar meninggal, kedudukannya sebagai redaktur digantikan oleh Rivai Apin. Untuk beberapa lamannya, *Gelanggang* berpengaruh di kalangan intelektual Indonesia. nama-nama besar dalam kesusasteraan dan kebudayaan di Indonesia, seperti Pramoedya Ananta Toer, Sitor Situmorang, HB Jassin, Bujung Saleh dan Agam Wispi mengisi halaman-halaman yang ada di ruang kebudayaan *Gelanggang*, warta sepekan *Siasat*.

C. Profil Pengelola Redaksi *Siasat*

Dalam melihat *Siasat*, penting kiranya untuk melihat siapa-siapa saja yang berada di dalam penerbitan itu. Berikut beberapa nama anggota redaksi yang memiliki peran penting di dalam menjalankan *Siasat*:

Rosihan Anwar dilahirkan. 10 Mei 1922, di Kubang Nan Dua, Sumatera Barat. Oleh Anwar gelar Maharadja Soetan, ayahnya, pegawai pamongpraja Hindia Belanda berpangkat Asisten Demang, ia diberi nama Rozehan Anwar. Kelak, nama itu lebih dikenal dengan Rosihan Anwar.

Selepas sekolah menengah, Meer Uitgebreid Lager Ondrewijs di Padang, Rosihan Anwar melanjutkan ke Algemene Middelbare School Westers Klassieke Afdeling (AMS A-II), jurusan Sastra Klasik Barat di Yogyakarta. Selama tiga tahun menimba ilmu di sana, ada dua nama yang selalu ia ingat; Dr Tjan Tjoe Siem, pemilik indekostnya, dan H.J. van de Berg, guru sejarahnya. Kedua orang itu lah yang mengusik alam pikiran Rosihan, memperkenalkannya pada ajaran sosialisme.

Van de Berg, menurut Rosihan dalam otobiografinya *Menulis Dalam Air*, adalah guru sejarah yang pandai bercerita secara menawan. Berg suka menyetensil uraiannya, yang kemudian membagi-bagikan kepada murid-muridnya. Salah satu uraiannya ialah tentang penulis sosialis Jerman, Karl Marx. Rosihan juga acap membaca buku-buku sosialisme milik Meneer Tjan, begitu Dr Tjan Tjoe Siem dipanggil.

Selama menuntut ilmu, Rosihan membaca dan berkenalan dengan sosialisme, tapi belum memahaminya. Hingga suatu ketika, di zaman revolusi,

Rosihan mendapatkan sebuah pamflet politik. Sebuah buku kecil, seperti buku saku, tergeletak di meja redaksi Merdeka, dimana Rosihan bekerja sebagai wartawan. Ia ambil, dan membacanya. Pamflet itu berjudul "Perjuangan Kita", ditulis oleh Sutan Sjahrir. Isinya begitu dahsyat. Memancing kemarahan orang-orang politik, terutama yang pernah bekerja sama dengan pemerintahan balatentara Dai Nippon. "Inilah orang yang akan memperjuangkan tegaknya de menselijke waardigheid, martabat kemanusiaan di bumi persada Indonesia," pikirnya.

Setelah melahap habis, ditaruhnya kembali pamflet itu. Ia begitu terpesona. Merasa lebih terbuka melihat peta politik internasional. Kemudian ia membaca buku Sjahrir yang terbit di negeri Belanda, *Indonesische Overpeinzingen* (Renungan Indonesia). Rosihan mulai mengenal Sjahrir ketika Sjahrir menjabat sebagai Perdana Menteri. Rosihan juga mulai bergaul dengan Soedjatmoko yang bertugas di Kementerian Penerangan. Juga Sudarpo Sastrosatomo yang mengurus hubungan dengan koresponden-koresponden asing. Dan Subadio Sastrosatomo, anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat. Ketiganya dikenal sebagai Sjahririest atau orang-orang Sjahrir.

Soedjatmoko, lahir pada 10 Januari 1922 di Sawahlunto, Sumatera Barat. Ayahnya, Dr Saleh Mangundiningrat bekerja sebagai dokter di rumah sakit setempat. Sebagai anak ningrat, Soedjatmoko mengenyam pendidikan yang bermutu, mulai dari ELS (Europeesch Lagere School) ,HBS (Hogere Burgere School), Lyceum, Geneeskundige Hooge School/Ika Daigaku, Jakarta (1940-1943, tidak selesai).

Seperti telah dipaparkan di atas, Soedjatmoko pernah bekerja sebagai wartawan Het Inzicht dan kemudian bekerja sebagai redaktur di *Siasat*.

Sekolah formalnya di Sekolah Tinggi Kedokteran terhenti karena sikapnya yang tidak mau berkompromi dengan pemerintah pendudukan Jepang. Koko lantas memencilkan diri ke Solo, dan tenggelam dalam keasyikan membaca buku-buku loakan yang ia dapatkan dari Pasar Klewer, Solo. Di masa pengucilan itu pula Koko, di samping menekuni buku-buku karya Bergson, Max Scheler, Karl Jasper, dan Martin Heidegger, juga mempelajari mistik Islam, Katolik, India, dan alam kebatinan Jawa. Di kota itu pula ia sempat berdialog dengan Ki Ageng Suryomentaram, tokoh pemikiran Jawa.

Seperti dikatakan Aswab Mahasin ketika memberikan pengantar untuk buku Soedjatmoko, *Dimensi Manusia dalam Pembangunan*, "Susah menunjukkan kotak di mana Koko berada." Dalam menguraikan gagasan-gagasannya, Soedjatmoko memang merambah segala batasan disiplin ilmu tertentu. Pemikirannya multidimensional.

Soedjatmoko menjalani masa kecilnya yang pertama di Negeri Belanda. Pulang ke tanah air ketika berusia tujuh tahun, ia merasakan pedihnya diperlakukan sebagai inlander. Ayahnya -- dokter K.R.T. Saleh Mangundiningrat, ahli bedah berpendidikan Barat, yang kemudian menjadi dokter Keraton Surakarta dan sempat memimpin Universitas Islam Cokroaminoto -- jelas keluarga priayi, yang lazimnya di bawah pengaruh budaya Hindu, Islam, dan sekaligus Barat. Latar belakang ini, dan berbagai perbenturan nilai yang ia alami di masa pertumbuhannya, menyebabkan,

kata Aswab Mahasin, "Soedjatmoko anak sejati dari perubahan." Koko memiliki beberapa gelar Doktor Kehormatan, masing-masing dari Universitas Cedar Crest, AS (1969); Universitas Yale, AS (1970), dan Universitas Kenegaraan Malaysia (1980).

Sanjoto Sastromihardjo mulai terjun ke dunia jurnalistik pada 1946 ketika Kementerian Penerangan RI menerbitkan majalah berbahasa Belanda *Het Inzicht* guna mengimbangi propaganda Belanda melalui majalah itu. Ketika Soedjatmoko dan Rosihan Anwar mendirikan majalah politik/budaya *Siasat* pada 4 Januari 1947, Sanjoto ikut bergabung di dalamnya. Kemudian, pada 29 November 1947 terbit di Jakarta harian yang mendukung perjuangan Republik Indonesia bernama *Pedoman* dengan pemimpin redaksi Rosihan Anwar dan Sanjoto selaku wakil pemred. Ketika *Pedoman* dilarang terbit oleh Presiden Soekarno pada 7 Januari 1961, Sanjoto masuk dan bekerja di *Business News*, sebuah penerbitan yang sejak November 1956 khusus memberitakan dan mengulas soal-soal ekonomi.³⁴

Asrul Sani lahir di Rao, Pasaman, Sumatera Barat 10 Juni 1927. Ia dikenal sebagai seniman kawakan yang antara lain dikenal lewat Sajak Tiga Menguak Takdir bersama Chairil Anwar dan Rivai Apin (ketiganya pengasuh ruangan kebudayaan Gelanggang). Mereka bersama-sama berjudul "Tiga Menguak Takdir" yang kemudian diterbitkan dalam bentuk buku di tahun 1950. Mereka bertiga bukan hanya menjadi pendiri "Gelanggang Seniman Merdeka" dan pengasuh rubrik Gelanggang di *Siasat*, malahan didaulat menjadi tokoh pelopor sastrawan Angkatan

³⁴ Rosihan Anwar, Kamis, *Obituari: Wartawan Ekonomi Senior Sanjoto (1923-2003)*. *Koran Tempo*, 17 Juli 2003.

45. Asrul Sani banyak menulis puisi di majalah “*Siasat*”, “*Mimbar Indonesia*”, dan “*Zenith*”.

Asrul Sani yang pernah duduk sebangku dengan sastrawan Pramoedya Ananta Toer sewaktu sekolah di SLTP Taman Siswa Jakarta, bersama kawan-kawan telah menyatukan visi perjuangan revolusi kemerdekaan ke dalam bentuk Lasjkar Rakjat Djakarta. Masih di masa revolusi itu, di Bogor dia memimpin Tentara Pelajar, menerbitkan surat kabar “*Suara Bogor*”, redaktur majalah kebudayaan “*Gema Suasana*”, anggota redaksi “*Gelanggalang*”, ruang kebudayaan majalah “*Siasat*”, dan menjadi wartawan pada majalah “*Zenith*”. Hingga tiba pada bulan Oktober 1950 saat usianya masih 23 tahun, Asrul Sani sudah mengkonsep sekaligus mengumumkan pemikiran kebudayaannya yang sangat monumental berupa “*Surat Kepercayaan Gelanggalang*”, yang isinya adalah sebetuk sikap kritisnya terhadap kebudayaan Indonesia. Isinya, antara lain berbunyi, ‘kami adalah ahli waris yang sah dari kebudayaan dunia dan kebudayaan ini kami teruskan dengan cara kami sendiri. Kami lahir dari kalangan orang banyak dan pengertian rakyat kecil bagi kami adalah kumpulan campur baur dari mana-mana dunia-dunia baru yang sehat dan dapat dilahirkan’. Sekitar tahun 1955 hingga 1957 Asrul Sani pergi ke Amerika Serikat untuk menempuh pendidikan dramaturgi dan sinematografi di University of Southern California.

Chairil Anwar Chairil Anwar (Medan, 26 Juli 1922 — Jakarta, 28 April 1949) atau dikenal sebagai "Si Binatang Jalang" adalah penyair terkemuka Indonesia. Bersama Asrul Sani dan Rivai Apin, ia dinobatkan oleh H.B. Jassin sebagai pelopor

Angkatan '45 dan puisi modern Indonesia. Chairil Anwar adalah anak tunggal. Ayahnya bernama Toeloes, bekerja sebagai pamongpraja. Dari pihak ibunya, Saleha dia masih punya pertalian keluarga dengan Sutan Sjahrir, Perdana Menteri pertama Indonesia.

Chairil masuk Hollands Inlandsche School (HIS), sekolah dasar untuk orang-orang pribumi waktu penjajah Belanda. Dia kemudian meneruskan pendidikannya di Meer Uitgebreid Lager Onderwijs, sekolah menengah pertama Belanda, tetapi dia keluar sebelum lulus. Dia mulai untuk menulis sebagai seorang remaja tetapi tak satupun puisi awalnya yang ditemukan.

Pada usia sembilan belas tahun, setelah perceraian orang-tuanya, Chairil pindah dengan ibunya ke Jakarta di mana dia berkenalan dengan dunia sastra. Meskipun pendidikannya tak selesai, Chairil menguasai bahasa Inggris, bahasa Belanda dan bahasa Jerman, dan dia mengisi jam-jamnya dengan membaca pengarang internasional ternama, seperti: Rainer M. Rilke, W.H. Auden, Archibald MacLeish, H. Marsman, J. Slaurhoff dan Edgar du Perron. Penulis-penulis ini sangat mempengaruhi tulisannya dan secara tidak langsung mempengaruhi puisi tatanan kesusasteraan Indonesia.

Nama Chairil mulai terkenal dalam dunia sastra setelah pemuatan tulisannya di "Majalah Nisan" pada tahun 1942, pada saat itu dia baru berusia dua puluh tahun. Hampir semua puisi-puisi yang dia tulis merujuk pada kematian. Sejak Januari 1947, bersama Ida Nasution, Asrul Sani dan Siti Nurani dia mengelola ruang kebudayaan Gelanggang di *Siasat*.

Vitalitas puitis Chairil tidak pernah diimbangi kondisi fisiknya, yang bertambah lemah akibat gaya hidupnya yang semrawut. Sebelum dia bisa menginjak usia dua puluh tujuh tahun, dia sudah kena sejumlah penyakit. Chairil Anwar meninggal dalam usia muda karena penyakit TBC. Dia dikuburkan di Taman Pemakaman Umum Karet Bivak, Jakarta. Makamnya diziarahi oleh ribuan pengagumnya dari zaman ke zaman. Hari meninggalnya juga selalu diperingati sebagai Hari Chairil Anwar.

Rivai Apin, penyair angkatan 45 kelahiran tahun 1927. Ia termasuk ke dalam penyair intelektual yang turut mewarnai jagat kesusasteraan Indonesia pascakemerdekaan. Ia bergabung dengan *Siasat* semenjak tahun 1949 dan keluar dari *Siasat* pada 1957. Keluar dari *Siasat* dia mendirikan majalah kebudayaan Zaman Baru bersama-sama sastrawan kampiun AS Dharta. Semenjak saat itu juga dia bergabung dengan Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), sebuah organisasi seniman yang berafiliasi kepada Partai Komunis Indonesia.

D. Benang Merah Pemikiran Rosihan Anwar dengan Soedjatmoko

Sosialisme. Itulah kata atau ideologi yang menjembatani pemikiran Rosihan Anwar dengan Soedjatmoko. Rosihan Anwar secara tegas mengklaim dirinya sebagai penganut sosialisme. Sementara itu, kendati tidak pernah mengakui dirinya sebagai apa, Soedjatmoko, dengan segala aktivitas politiknya yang intim dengan Sjahrir dan keanggotaan di dalam Partai Sosialis Indonesia (PSI), menunjukkan dirinya sebagai seorang sosialis.

Rosihan adalah pemuda terakhir yang masuk ke dalam lingkaran Sjahrir. Sebelumnya, sudah ada Soebadio Sastrosastomo, Soedarpo dan Soedjatmoko di dalam lingkaran yang kerap disebut sebagai Sjahririest itu. Tentang bagaimana Rosihan tertarik kepada Sosialisme dapat diketahui dari pengakuannya yang ia tulis di dalam otobiografinya, *Menulis Dalam Air*:

Maka sebetulnya jika dicari apa sebabnya saya tertarik kepada sosialisme, hal itu bukan lantaran membaca buku-buku tentang sosialisme, bukan lantaran paham ajaran dan teori sosialisme, melainkan lantaran pengaruh yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari ketiga orang yang saya sebutkan tadi ialah Sutan Sjahrir, Soedjatmoko dan Soebadio Sastrosatomo. Saya menjadi bersahabat baik dengan mereka, dan dari pergaulan itu saya beroleh pengetahuan lebih jauh tentang sosialisme. Jadi dapat dikatakan "Sosialisme by osmosis", melalui osmosa, pelajaran dan pengertian secara berangsur-angsur, begitulah kisah saya menjadi orang sosialis³⁵

Rosihan mencoba menjadi orang yang independen, dalam arti kendati dia menjadi seorang sosialis, namun dia tak menunjukkan minatnya untuk bersungguh-sungguh menekuni jalan itu dengan cara menjadi anggota PSI.

Dalam otobiografinya Rosihan mengutip pendapat pemikir Italia Ignazio Silone tentang dirinya yang mengatakan *I'am Socialist without a party and Christian without a Church* (saya seorang sosialis tanpa partai dan penganut kristen tanpa gereja). Dengan dasar pemikiran yang dia pinjam dari Silone itulah Rosihan memiliki pemikiran bahwa tanpa partai dirinya akan berusaha memperjuangkan terus cita-cita sosialisme yang buat Rosihan secara sederhana dapat dipahami sebagai kemanusiaan, kerakyatan dan keadilan.

³⁵ Rosihan Anwar, *Menulis Dalam Air* (Jakarta: Pustaka Sinar harapan, 1983) hal. 112

Rosihan adalah simpatisan, bukan aktor aktif di dalam pergerakan kaum sosialis di Indonesia, sebagai mana rekan-rekannya yang lain. Posisinya sebagai jurnalis amat memungkinkan berpengaruh kuat pada pemahamannya tentang bagaimana seharusnya seorang wartawan bertindak dan berpikir.

Rosihan tak setuju dengan komunisme. Menurutnya, komunisme itu menghalalkan beragam cara untuk mencapai tujuannya. Hal tersebut terlihat dari tulisan editorialnya di mingguan *Siasat* yang selalu menghantam PKI Musso, yang pada saat itu terlibat di dalam peristiwa Madiun, 1948.

Pengaruh pemikiran Sjahrir terhadap diri Rosihan teramat kuat, termasuk kepada bagaimana Rosihan mengartikan sosialisme itu sendiri. Sjahrir seakan seperti seorang penyampai ajaran yang tak diragukan lagi kebenarannya oleh Rosihan. Kebencian Rosihan kepada komunisme pun besar kemungkinannya karena pengaruh pemikiran Sjahrir.

Dalam sebuah pidatonya di tahun 1950-an, Sjahrir mengatakan bahwa komunisme memandang orang-orang sebagai suatu bagian abstrak daripada paham golongan, kelas, aktivitas atau memandangnya hanya sebagai tenaga kerja, faktor penghasil semata-mata. Komunisme, demikian Sjahrir, tidak saja dalam teori tapi juga dalam praktek hanya mengikhtiarkan disiplin partai. Dalam praktek hanya ia memandang dan memperlakukan semua orang yang tidak tunduk pada disiplin serta

ajaran partainya sebagai musuhnya yang boleh diperlakukan dengan tidak mengindahkan kesusilaan.³⁶

Sementara itu sosialisme menurut Rosihan Anwar, mengutip pada Sjahrir adalah sosialisme yang berdasar kerakyatan yang menunjung tinggi derajat kemanusiaan. Penghargaan pribadi manusia serta pandangan yang demikian itu sebenarnya inti dari segala pencipta sosialisme yang besar-besar seperti Marx, Engels dan sebagainya. Rosihan kemudian menambahkan keterangan Sjahrir tentang sosialisme bahwa semestinya ideologi itu tiada lain daripada penyempurnaan dari segala cita-cita kerakyatan yaitu kemerdekaan serta kedewasaan kemanusiaan yang sebenarnya.

Dari sana dapat diketahui makna sosialisme bagi Rosihan adalah kemerdekaan dengan kata lain kebebasan menentukan sikap sebagai manusia dewasa. Tapi tentu saja untuk mencapai kemerdekaan dan kedaulatan penuh atas diri manusia itu perlu perjuangan dan usaha yang kuat. Sjahrir, mentor politik Rosihan dan para pemuda lainnya telah jauh hari mengatakan hal itu. Dalam dua pucuk suratnya yang ditulis dari penjara Cipinang dan dari tempat pembuangan di Boven Digoel, Sjahrir mengutip sepenggal sajak penyair Jerman, Friedrich Schiller. Dalam teks aslinya kutipan itu berbunyi *und setzt ihr nicht das Leben ein, nie wird euch das Leben gewonnen sein*, yang kurang lebih bermakna: hidup yang tak dipertaruhkan, tak akan pernah dimenangkan. Menurut pengakuannya, kalimat-kalimat yang indah itu

³⁶ Ignas Kleden dalam *Orasi Mengenang Sutan Sjahrir*, 8 April 2006, TIM, Jakarta

dikutipnya dari luar kepala, jadi kita dapat menduga petikan tersebut sangat disukainya dan besar artinya buat hidupnya.

Menurut sosiolog Ignas Kleden, bagi Sjahrir politik rupanya bukanlah semata-mata perkara yang pragmatis sifatnya, yang hanya menyangkut suatu tujuan dan cara mencapai tujuan tersebut, yang dapat ditangani dengan memakai rasionalitas instrumental atau Zweckrationalitaet yang diajarkan Max Weber. Bagi Sjahrir politik lebih dari pragmatisme simplistis, tetapi mengandung sifat eksistensial dalam wujudnya, karena melibatkan juga rasionalitas nilai-nilai atau Wertrationalitaet dalam pengertian Max Weber (3). Karena itulah politik lebih dari sekedar matematika tentang hubungan mekanis di antara tujuan dan cara mencapainya.

Politik lebih mirip suatu etika yang menuntut agar suatu tujuan yang dipilih harus dapat dibenarkan oleh akal sehat yang dapat diuji, dan cara yang ditetapkan untuk mencapainya haruslah dapat dites dengan kriteria moral. Kalau politik dalam pengertian Sjahrir bukan semua yang disebut di atas, apa gerangan politik menurut pandangan dia? Menurut tafsiran Ignas Kleden, kutipan dari Friedrich Schiller tersebut adalah sebagian jawabannya. Kalau penggal sajak Schiller itu boleh kita parafrasekan, maka politik bagi Sjahrir adalah *das Leben einsetzen und dadurch das Leben gewinnen*, politik adalah mempertaruhkan hidup dan dengan itu memenangkan hidup itu sendiri.³⁷

Pertaruhan di dalam hidup itu menandakan sebuah kemandirian; sebuah kebebasan untuk mengikuti jalan mana hidup akan dipertaruhkan. Dari pemikiran

³⁷ Ignas Kleden dalam *ibid.*, *Orasi mengenang Sutan Sjahrir*

Rosihan jelas sekali bahwa dia melihat manusia harus memiliki kemerdekaan dan berdaulat penuh atas dirinya sendiri, yang kemudian bermuara pada demokrasi. Bagi Rosihan, demokrasi “itu terletak pada relung kalbu manusia”. Demokrasi, demikian Rosihan, suatu *state of mind* daripada dan terhadap mayoritas. Suatu *state of mind* terhadap dan daripada minoritas. Suatu *state of mind* oleh dan untuk individu.³⁸

Pemikiran Rosihan tentang sosialisme yang kemudian mengerucut kepada kebebasan manusia di dalam pilihan hidupnya itu memiliki relasi kuat dengan pemikiran Soedjatmoko. Soedjatmoko senantiasa bergulat dengan satu persoalan yang sama, yakni bagaimana menyelamatkan dan mempertahankan kebebasan dan otonomi manusia yang menerima ancaman dari seluruh penjuru kehidupan. Ancaman di dalam kehidupan itu bisa berupa model ekonomi yang diterapkan, ancaman ideologi yang dianut dan praktek politik yang dijalankan, dan bahkan ancaman dari bentuk kehidupan agama yang terlalu fanatik dan tertutup.

Buat Soedjatmoko persoalan independence beralih menjadi masalah freedom. Dengan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, maka kebebasan justru baru dimulai. Bagi Soedjatmoko freedom adalah “pembebasan dari rasa tak berdaya dan dari ketergantungan...dari rasa cemas, dari rasa keharusan untuk mempertanyakan

³⁸ Rosihan Anwar, *Menulis Dalam Air* (Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1983) Hal. 130.

apakah tindakan-tindakan mereka diizinkan atau tidak diizinkan oleh wewenang yang lebih tinggi ataupun oleh adat kebiasaan.³⁹

Dengan demikian untuk memahami pemikiran Soedjatmoko maka kata kunci yang harus digarisbawahi adalah otonomi. Dalam membicarakan tradisi misalnya, Soedjatmoko lebih cenderung untuk melihat hal tersebut sebagai sebuah sistem nilai, sistem makna dan sistem tingkahlaku yang kurang lebih lengkap dan mampu berdiri sendiri, tanpa perlu dilengkapi dengan sistem lain dari luar. Dalam artian, sekelompok orang yang menganut suatu tradisi apa pun dapat berkembang sampai pada tahap tertentu dan menghayati kehidupan mereka dalam batas-batas tata tertib yang mereka anut. Pandangan otonomi inilah yang menurut Soedjatmoko perlu diperhatikan secara luas; artinya manusia memang lahir sebagai *das solen* dan *das sein*.

Kembali kepada persoalan relasi pemikiran Rosihan Anwar dan Soedjatmoko maka pada awalnya adalah sosialisme yang kemudian berhilir kepada kemerdekaan, kedaulatan atau dalam istilah Soedjatmoko: otonomi sebagai manusia. Dengan kebebasan itulah manusia mampu mencapai suatu derajat kehidupan yang dicitak-citakannya. Kebebasan yang mereka maksudkan tentu saja bukan berarti mengabaikan norma-norma yang mengatur hidup manusia secara universal. Otonomi menurut Soedjatmoko menunjuk aspek statis atau suatu identitas yang sudah terbentuk. Sementara itu, kebebasan menurut Soedjatmoko yang agaknya berelasi

³⁹ Soedjatmoko, *Development and Freedom* (Tokyo: The Simul Press Inc, 1980) Hal. 95

dengan pemikiran Rosihan Anwar adalah kebebasan yang menunjuk aspek dinamis, yakni perubahan untuk mencari identitas baru yang berujung pada kesejahteraan manusia secara keseluruhan.

E. Sumbangan Pemikiran Soedjatmoko dan Rosihan Anwar kepada *Siasat* dan Pengaruhnya Dalam Wacana Publik di Indonesia

Sebagaimana cita-cita awal yang dikemukakan oleh Rosihan dengan Soedjatmoko bahwa *Siasat* memiliki tujuan untuk menjadi majalah politik dan budaya yang terpandang. Oleh karena itu maka *Siasat* terpengaruh kuat oleh pemikiran kedua tokoh tersebut. Baik Rosihan dan Soedjatmoko adalah pemuda Sjahrir yang cukup dekat dengan Sjahrir dan tentunya memiliki kecenderungan agar *Siasat* membawa suara orang-orang sosialis pula.

Sejak awal, ketika *Siasat* menerbitkan nomer perdananya, maka jelas sudah terlihat garis politik *Siasat*. Soedjatmoko menulis sebuah risalah mengenai persoalan revolusi Indonesia dalam Kedoedoekan Indonesia: *Batas Gelanggang Perdjoengan*. Dalam tulisannya itu Soedjatmoko menjelaskan kepada khalayak bahwa pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh dunia internasional adalah suatu hal yang penting. Dan yang menentukan sikap dunia internasional itu antara lain negara-negara besar yang kesemuanya kapitalis kecuali Rusia. Di antara kepentingan negara-negara kapitalis itulah, demikian Soedjatmoko, merupakan *Batas Gelanggang Perdjoengan* kita.

Gaya tulisan dan ide yang digunakan oleh Soedjatmoko tampaknya terpengaruhi oleh Sjahrir dalam tulisan sebelumnya, *Perjuangan Kita*. Pamflet tersebut menjadi bacaan rujukan buat anggota PSI, dan Soedjatmoko memahami benar apa yang ada di dalam pikirannya gurunya itu.

Baik Soedjatmoko dan Rosihan mengkhawatirkan bahwa suatu saat, setelah kemerdekaan dicapai, Indonesia justru akan terjebak kembali kepada feodalisme. Di dasar hatinya Sjahrir mendambakan kebebasan untuk setiap orang, yaitu individu-individu yang dapat menggunakan akal-pikirannya untuk bertanggungjawab terhadap cita-cita dan tindak-perbuatannya masing-masing. Impian itu mempunyai beberapa konsekuensi yang amat nyata. Pertama, dalam negeri Sjahrir sangat cemas akan hidupnya kembali feodalisme lama dalam politik Indonesia, yang dapat mengakibatkan bahwa kemerdekaan nasional justru memberi kesempatan kepada para pemimpin politik untuk menjadi raja-raja versi baru yang tetap membelenggu rakyatnya dalam ketergantungan dan keterbelakangan. Karena itu selain revolusi nasional dibutuhkan juga suatu revolusi sosial yang dinamakannya revolusi kerakyatan.

Pemikiran-pemikiran Sjahrir tampak diresapi secara serius oleh kedua pengikutnya tersebut. Sehingga pada pemikiran Rosihan dan Soedjatmoko masih bisa dilacak jejak-jejak pemikiran Sjahrir. Dalam pemikiran Sjahrir revolusi nasional harus didahulukan, karena hanya dalam alam kemerdekaan perjuangan menentang feodalisme dan perjuangan untuk membebaskan diri cengkeraman kapitalisme dapat dilaksanakan. Kolonialisme Belanda, menurut Sjahrir, telah mengawinkan rasio

modern dari Barat dengan feodalisme lokal dengan sangat cerdas, dan hasilnya adalah semacam fasisme terselubung, yang menyiapkan lahan subur untuk fasisme Jepang. Seterusnya, partai politik sebaiknya berbentuk partai kader dan bukan partai massa, karena dengan partai kader para anggota partai yang mempunyai pengetahuan dan keyakinan politik dapat ikut memikul tanggungjawab politik, sedangkan dalam partai massa keputusan politik diserahkan seluruhnya ke tangan pemimpin politik, dan massa rakyat tetap tergantung dan tinggal dimobilisasi menurut kehendak sang pemimpin. Demikian pun dalam politik nasional, dia bersama Bung Hatta mendorong berkembangnya sistem multi-partai agar supaya kehidupan politik terhindar dari konsentrasi kekuasaan yang terlalu besar pada diri satu orang atau satu golongan.⁴⁰

Bila dilihat dari beberapa berita yang diturunkan oleh redaksi *Siasat* maka tampaklah apa yang jadi pemikiran Rosihan Anwar dan Soedjatmoko yang mengikuti pemikiran ala Sjahrir. Kekhawatiran Sjahrir mengenai pemusatan kekuasaan pada satu orang diikuti oleh *Siasat* dengan jalan secara berkala mengajukan kritik terhadap bentuk negara-negara federal buatan van Mook di mana para pemimpin negara-negara kecil itu justru menampakkan dirinya sebagai penguasa tunggal.

Dalam berita yang menyoal tentang Negara Indonesia Timur (NIT) Rosihan Anwar memertanyakan sikap Perdana Menteri NIT Nadjamudin Daeng Malewa yang bersikap arogan dan, dalam istilah mereka, “padukaisme”. Rosihan mengkritik habis sikap para pejabat di NIT yang menampakkan sikap sok-kuasanya sekaligus mengkritik feodalisme yang masih berlangsung di sana.

⁴⁰ Sutan Sjahrir, *Perdjoangan Kita*

Bukan hanya kepada NIT, tapi juga kepada rencana pembentukan negara Kalimantan *Siasat* mengambil posisi kritis terhadap rencana tersebut. Gadis Rasid⁴¹, salah seorang wartawan *Siasat* mempertanyakan sikap Belanda yang ingin membentuk negara Kalimantan. Pada bagian lain Rosihan juga menyerang kebijakan petinggi Bali yang menutup mata terhadap berbagai soal yang terjadi di daerahnya, semisal dalam hal keberadaan laskar-laskar republikain yang terjepit di sana.

Dari berbagai berita sepanjang tahun 1948 maka terang sekali posisi *Siasat* di dalam menyuarakan suara republik. *Siasat* membela habis-habisnya bentuk negara kesatuan yang diperjuangkan oleh para pemimpin republik ini di dalam setiap perjanjian dengan pihak Belanda. Dan setiap usaha memecah belah wilayah Republik Indonesia selalu diserang habis-habisan oleh *Siasat* melalui pemberitaannya.

Salah satu polemik yang cukup terkenal dan banyak mempengaruhi jagad intelektual di Indonesia adalah perdebatan antara Soedjatmoko dengan Bujung Saleh. Awal polemik ini dipicu oleh tulisan Soedjatmoko “Mengapa Konfrontasi” di majalah dua bulanan Konfrontasi. Majalah tersebut merupakan lanjutan dari majalah Pujangga Baru di bawah asuhan Sutan Takdir Alisjahbana dan Achdiat Kartamihardja. Tulisan Soedjatmoko banyak menimbulkan polemik karena mengajukan pertanyaan tentang krisis di dalam kesusasteraan di Indonesia. Tulisan Soedjatmoko tersebut semakin menarik ketika dia mempertanyakan tujuan nasional bangsa Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan.

⁴¹ Gadis Rasid adalah satu-satunya wartawan *Siasat*. Dia kemudian pada 1950 menikah dengan Henk Rondonuwu, bekas menteri penerangan Negara Indonesia Timur. Sejak menikah namanya jadi Gadis Rondonuwu.

Balasan demi balasan dan diskusi pun terjadi dengan hangatnya di lembaran kebudayaan *Gelombang* di majalah *Siasat*. Perubahan susunan masyarakat Indonesia menurut Soedjatmoko di dalam balasannya kepada Bujung, terlihat dari terlepasnya masyarakat Indonesia dari kungkungan feodalisme dan susunan masyarakat yang tertutup, sudah mulai dan tidak dapat ditahan lagi. Revolusi Indonesia, demikian Soedjatmoko, akan berakhir dengan reintegrasi masyarakat Indonesia yang didasarkan atas urutan-urutan yang tertekan kehidupannya dalam susunan masyarakat lama.

Pernyataan Soedjatmoko di atas yang dimuat di *Siasat*, 5 September 1954 menohok kaum intelektual di Indonesia. Soedjatmoko mempertanyakan peranan kaum intelektual yang sepertinya jauh dari keadaan obyektif masyarakat. Ia kemudian mencotohkan bagaimana karya sastra ditulis yang justru tidak menampilkan bagaimana keadaan yang sesungguhnya dari masyarakat. Soedjatmoko seakan menggugat keadaan; mempertanyakan tentang kondisi yang terjadi di alam kemerdekaan.

Gagasan-gagasan di dalam tulisannya itu memang mencerminkan bagaimana pemikirannya tentang makna kebebasan di alam kemerdekaan. Karena menurutnya alam kemerdekaan hanya menyediakan sebuah alam lain di mana masyarakat yang semua dijajah akan dijamin kebebasannya untuk meraih penghidupan yang lebih baik. Namun demikian apa yang terjadi dan ditemui oleh Soedjatmoko justru berada di dalam situasi yang sebaliknya.

Pemikiran ini pula yang agaknya diadopsi oleh redaksi untuk membuat sebuah rubrik yang bernama *Inilah Indonesia*. Rubrik ini secara teratur, setiap *Siasat* terbit seminggu sekali, menampilkan kejadian atau memberitakan keadaan masyarakat di kelas bawah. Rubrik tersebut seakan mencerminkan apa yang terjadi lapangan dan apa yang dilihat oleh Soedjatmoko. Hampir setiap *Siasat* terbit rubrik tersebut memberitakan kelaparan, kesusahan yang dialami oleh rakyat.

Nama *Inilah Indonesia* sendiri mengajukan sebuah kritik satire tentang sebuah negeri yang masih terpuruk kendati sudah berada di alam merdeka. Inilah gaya *Siasat* di dalam melancarkan kritiknya kepada kekuasaan. Sikap *Siasat* memang tanpa tedeng aling-aling di dalam menyerang kekuasaan. Seperti yang dikatakan oleh Rosihan Anwar tentang *Siasat* di masa awal berdirinya, yang menarik minat orang banyak untuk membacanya karena sikap *Siasat* yang berani mengkritik kanan dan kiri.

Sikap redaksi itu mencerminkan tentang siapa yang berada di balik redaksi. Rosihan dikenal sebagai wartawan yang kritis, begitu pula dengan Soedjatmoko, terkenal sebagai intelektual yang cerdas dan bernas di dalam menulis artikelnya. Dengan demikian sikap redaksi *Siasat* mencerminkan siapa yang berada di belakangnya.

BAB III

KEBIJAKAN PEMBERITAAN WARTA SEPEKAN *SIASAT*

A. Politik Redaksi Warta Sepekan *Siasat*

Dalam tulisannya untuk mengenang Soedjatmoko, George Mc. Turnan Kahin, Indonesianis asal Amerika Serikat yang dihormati banyak pihak mengatakan bahwa *Siasat* adalah satu di antara jurnal-jurnal yang berorientasi sosialis yang paling berpengaruh.⁴² Memang jika dilihat dari komposisi pengelola redaksinya, terutama Rosihan Anwar dan Soedjatmoko, adalah pengikut Sjahrir yang tentu saja juga menganut faham sosialis.

Dalam jurnalistik dikenal istilah *personal journalism*, kurang lebih mengandung pengertian bahwa pendiri atau pemilik sebuah media massa adalah orang yang paling menentukan garis kebijakan redaksi. Sehingga apa yang redaksi turunkan sebagai berita adalah apa yang oleh pemilik inginkan. Ideologi pemilik, dalam konsep *personal journalism*, adalah ideologi yang dianut oleh segenap pengasuh redaksi. Namun dalam hal *Siasat*, apa yang disebut dengan *personal journalism* tidaklah terlampau kentara. Berbeda dengan surat kabar *Pedoman*, koran yang dibidani oleh Rosihan Anwar, didirikan satu atap bersama *Siasat*, boleh kiranya disebut sebagai *personal journalism*. Dalam *Pedoman* jelas sekali keberpihakannya kepada Partai Sosialis Indonesia (PSI), suatu hal yang tidak dilakukan di *Siasat*.

⁴² George Mc. Turnan Kahin, *In Memoriam Soedjatmoko, 1922 – 1989*. Dalam majalah Indonesia (New York: Cornell University, 1990)

Seperti telah dijelaskan di atas bahwa *Siasat* lahir sebagai realisasi dari kebutuhan adanya media yang bisa melawan propaganda jawatan penerangan Belanda sekaligus sebagai sarana pendidikan politik rakyat. Jelas bahwa *Siasat* sudah mengambil posisi secara tegas bahwa mereka berada di pihak republik. Keputusan keberpihakan kepada republik diambil bukannya tanpa resiko. Kota Jakarta memasuki tahun 1946 diduduki oleh serdadu NICA yang datang dengan dibonceng pasukan sekutu Inggris. Sementara itu Belanda pun memiliki penerbitannya masing-masing yang menurunkan berita 180 derajat berlawanan dengan apa yang diberitakan oleh media massa republikein.

Pada 21 Juli 1947, Belanda melancarkan aksi militer yang pertama. Kantor-kantor redaksi surat kabar republikein tak luput dari sasaran operasi mereka. *Siasat* yang berkantor di Jalan Cikini No. 70 diserang dan diduduki oleh tentara Belanda. Untuk sementara *Siasat* berhenti terbit. Pada clash pertama itu Rosihan Anwar, pemimpin redaksi *Siasat* ditahan oleh tentara Belanda di penjara Bukit Duri, Jatinegara. Tak beberapa lama kemudian ia pun dibebaskan dan *Siasat* pun kembali terbit.⁴³

Sejak tahun 1946 sampai dengan 1949 diadakan beberapa kali perundingan antara pihak republik dengan pihak Belanda untuk membicarakan status Indonesia. Dimulai dari perundingan Hoge Veluwe di Negeri Belanda, Linggarjati, Renville sampai dengan Konferensi Meja Bundar. Selain harus berdiplomasi dengan

⁴³ Rosihan Anwar, *Menulis Dalam Air, Sebuah Otobiografi*. (Jakarta: Sinar Harapan, 1983) Hal. 173 - 175

pihak Belanda, pemerintah juga disibukkan dengan urusan memperkuat tentara untuk menangkis serangan tentara Belanda. Upaya penyelenggaraan negara tersendat karena harus menyelesaikan beragam persoalan yang terjadi baik dari dalam maupun dari luar.

Posisi *Siasat* jelas. *Siasat* mendukung eksistensi Indonesia, satu hal dasar yang membedakannya dengan surat kabar terbitan jawatan penerangan Belanda. Buat *Siasat* cuma ada satu negara kesatuan republik. Redaksi dengan jelas menunjukkan ketidaksetujuannya pada bentuk federasi yang diajukan oleh Belanda, terlebih ketika usulan itu diajukan sebagai taktik untuk menguasai Indonesia dalam bentuk Uni Belanda-Indonesia. Sementara itu *Siasat* juga tidak menutup mata terhadap segala macam penyelewengan yang terjadi di kalangan penyelenggara negara Indonesia yang baru saja lahir itu.

Pada *Siasat* edisi 2 Mei 1948 misalnya, redaksi mengeritik delegasi Belanda yang tidak kunjung mengajukan *working paper* tentang pendirian Negara Indonesia Serikat. Padahal, menurut *Siasat*, pihak Belanda sudah terlebih dulu mengembar-gemborkan bentuk Uni Belanda-Indonesia. “Tampaklah lagi politik pengepungan dan politik “fait accompli Belanda jang sudah termahsjur itu,” demikian dalam berita utama *Siasat* edisi 2 Mei 1948.

Dalam tulisan lain edisi yang sama *Siasat* (lihat lampiran 1) menurunkan berita wawancara dengan Mr. Adil Puradiredja, salah satu petinggi Negara Pasundan. Dari tulisan tersebut tergambar jelas bagaimana kesulitan yang dihadapi oleh Negara Pasundan yang kekurangan sumber daya manusia untuk dijadikan menteri.

“Padahal Djokja tidak mau melepaskan orang-orang jang sebenarnja hendak saja minta. Selain dari itu masih ada kesulitan-kesulitan jang berdasarkan perbedaan kejakinan politik dengan kita,” ujar Puradiredja dalam wawancaranya. Pada akhir berita penulis membubuhkan kalimat kritik satir yang cukup pedas:

“Sementara itu hari sudah djauh siang. Sudah tiba waktunja untuk berangkat lagi bagi Mr. Adil. Sebab pukul 5 sore itu ia harus sudah di ibu-kota Negaranja, jang dia sendiri tidak minta....”⁴⁴

Jelas bahwa kalimat “ibu-kota Negaranja jang dia tidak minta” itu tidak datang dari Adil sendiri, namun lebih kepada tafsiran penulis berita dari pernyataan Adil. Opini yang masuk sebagai analisis ke dalam berita itu merupakan bentuk sindiran satiris tentang seorang pejabat dari sebuah negeri yang dia sendiri sebetulnya tak menginginkannya. Berita yang berjudul “Negara Pasundan, Hanja Alat Jang Dipaksakan Kepada Kita” itu sekaligus menunjukkan propaganda *Siasat* yang ingin menampilkan kenyataan tentang adanya kepentingan lain di balik pendirian negara-negara serikat oleh Belanda.

Sebagai koran yang mendukung republik, redaksi *Siasat* melakukan aksin propaganda dan agitasi dalam beberapa beritanya. Setelah perundingan Renville, wilayah Indonesia terdiri ke dalam berbagai negeri kecil. Praktis perundingan itu hanya menyisakan sebagian kecil wilayah Jawa (Yogyakarta) dan Madura. Sementara itu wilayah lain berada di dalam pendudukan Belanda, istilah yang digunakan saat itu

⁴⁴ *Siasat* edisi 2 Mei 1948. Tidak diketahui siapa yang mewawancarai Mr Adil Puradiredja. Tapi agaknya, dilihat dari inisial nama, pewawancara bernama Sanjoto, wartawan *Siasat*.

adalah “daerah pendudukan”. Bagaimana posisi redaksi *Siasat* di dalam menghadapi politik pecah belah oleh Belanda itu?

Siasat juga dengan tekun melaporkan perundingan-perundingan Indonesia-Belanda yang diatur oleh Komisi Tiga Negara yang dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB. Perundingan di atas kapal Amerika Renville yang berupaya menghilangkan eksistensi Republik Indonesia dari muka bumi itu secara terus menerus dilaporkan oleh *Siasat*.

Dalam rangka hari buruh 1 Mei 1948, *Siasat* mendorong kepada segenap organisasi buruh di daerah pendudukan untuk menyusun fron persatuan. Menurut *Siasat* perayaan hari buruh di daerah pendudukan tidaklah se bebas apa yang dilakukan di wilayah republik yang sudah merdeka seratus persen. Bahkan melalui tulisan itu *Siasat* menuduh Belanda bersikap seperti kaum fasis, sebuah kelompok yang justru diperangi oleh Belanda pada Perang Dunia Kedua.

Dari beberapa berita dan editorial yang diturunkan oleh redaksi tampak sekali lagi mempertegas politik redaksi yang memihak kepada Republik Indonesia. Konsistensi sikap redaksi sebagaimana yang digagas oleh Soedjatmoko dan Rosihan Anwar pada awal pendiriannya memang tetap terlihat, terutama pada periode 1947 sampai dengan 1950. *Siasat* juga secara pasti menyajikan berita-berita mengenai penyerangan-penyerangan yang dilakukan oleh tentara republik, begitu pula tentang penderitaan yang dialami rakyat di daerah-daerah pendudukan Belanda.

Salah satu indikator sikap politik redaksi lainnya bisa juga dilihat dari kolom pojok yang ada di *Siasat*. Kolom pojok adalah kolom khas yang hanya ada di

dalam tradisi jurnalistik di Indonesia. Kolom pojok biasanya berupa satu kalimat yang diambil sebagai pokok dari sebuah berita dan kemudian dikomentari baik secara satiris maupun secara komedi. Sebelum Perang Dunia Kedua ada wartawan bernama Saerun yang menulis pojok dengan nama *Kampret*. Lantas Parada Harahap pemimpin redaksi Tjahaja Timoer yang menggunakan nama Baron Maturaipek dalam kolom pojoknya, sementara Anwar Tjokroaminoto menggunakan nama Bang Bedjat ketika menulis kolom pojok.⁴⁵

Kolom pojok yang sudah ada semenjak pers bumiputra bermula itu menjadi model populer di kalangan surat kabar republikin. Sjamsuddin Sutan Makmur pemimpin redaksi surat kabar *Rakjat* bertanggungjawab langsung atas kolom pojok di korannya. Ia menggunakan nama Bang Golok yang acapkali melontarkan kritik-kritik pedas kepada pihak Belanda. Sama dengan yang lain, *Siasat* pun memiliki kolom pojok. Pada terbitan awal, yakni pada kurun 1947 sampai dengan 1949, kolom pojok *Siasat* diletakkan di halaman terakhir dengan nama kolom *Cetusan Siasat*. Barulah sekira tahun 1950, *Siasat* memiliki kolom pojok dengan nama Bang Betjak. Kolom pojok ini berupa karikatur seorang tukang becak yang bercakap-cakap dengan penumpangnya. Dan komentar atau pertanyaan Bang Betjak tersebut selalu mencerminkan berita terhangat pada saat itu. Kritik-kritik yang diajukan oleh kolom pojok itu memang acapkali terbaca sangat pedas.

Politik redaksi *Siasat* setelah penyerahan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada Konferensi Meja Bundar memang berubah. Semula, ketika sejak berdiri

⁴⁵ Rosihan Anwar dalam *loc.cit.*, Hal. 200

sampai dengan tahun 1949, sikap redaksi jelas sekali mendukung Republik Indonesia. Namun setelah terjadi pengakuan kedaulatan, *Siasat* menampilkan perannya sebagai pers yang berfungsi menjadi *watchdog* atau anjing pengawas bagi jalannya kekuasaan di republik ini. Nilai kritik pun sama pedasnya dengan apa yang mereka lakukan semasa Indonesia berada di bawah pendudukan Belanda.

Keunikan *Siasat* juga terletak pada bagaimana cara mereka memandang sosok Soekarno, presiden pertama Republik Indonesia. *Siasat* selalu menurunkan berita yang bersifat kritik namun tersembunyi, tidak menyampaikan pesan kritiknya secara langsung. Terkadang redaksi memberikan kritiknya melalui kolom pojok Bang Betjak atau lewat keterangan foto pada gambar Soekarno (periksa lampiran).

Ketika harga beras naik, dan Soekarno menjanjikan untuk mengatasinya, kolom pojok Bang Betjak menurunkan satir yang menohok. Digambarkan bagaimana Bang Betjak mengeluh tentang naiknya harga beras yang tentu saja makin tak terjangkau olehnya. Dari beberapa kali terbitan *Siasat*, pada saat menyangkut pemberitaan Soekarno, dapat dipastikan posisi mereka yang kritis terhadapnya.

Satu bagian lain yang tak dapat dipisahkan dari *Siasat* adalah ruang kebudayaan *Gelanggang*. Rubrik ini menjadi semacam medium theoretical exercise intelektual di Indonesia. Namun berbeda dengan pengelola redaksi di *Siasat*, rubrik khusus ini tampak pengelolaannya terpisah dari redaksi *Siasat*. Redaktur-redaktur penjaga rubrik kebudayaan *Gelanggang* tak sama sekali mencampuri urusan pemberitaan mereka di *Siasat*. Para pengasuh *Gelanggang* agaknya cuma berfokus pada rubrik yang mereka kelola saja. Paling tidak hal tersebut terlihat dari tiadanya

nama-nama pengasuh rubrik kebudayaan *Gelanggang* pada berita-berita umum di warta sepekan *Siasat*.

Jika pada pengasuh redaksi *Siasat*, terutama Soedjatmoko dengan Rosihan Anwar, yang mengikuti jalan sosialisme, maka pengelola rubrik kebudayaan *Gelanggang* lebih beragam. Asrul Sani, cukup dikenal sebagai seniman dan sastrawan sekaligus penulis skenario terkenal. Chairil Anwar, adalah sastrawan pelopor Angkatan 45. Kendati berumur muda, meninggal pada usia 27 tahun, Chairil sempat memberi warna pada *Siasat*, khususnya di ruang kebudayaan *Gelanggang*. Rivai Apin, juga dikenal sebagai sastrawan dan intelektual terbaik yang pernah ada di Indonesia. ketiga orang inilah, yang kemudian juga secara silih berganti dibantu Ida Nasution dan Siti Nurani, mengelola ruang kebudayaan *Gelanggang* di *Siasat*. Tiga serangkai Asrul Sani, Chairil Anwar dan Rivai Apin kemudian menulis kumpulan sajak *Tiga Menguak Takdir* yang kemudian oleh HB Jassin dinilai sebagai tonggak kelahiran sastra Angkatan 45.

Pada ruang kebudayaan *Gelanggang* ini tidak kalah menariknya diturunkan artikel-artikel mengenai kebudayaan, dan lebih dari itu memuat pemikiran para intelektual Indonesia mengenai negerinya sendiri. Polemik-polemik mulai dari soal kesusasteraan, kebudayaan sampai dengan perdebatan mengenai perumusan tentang jati diri bangsa Indonesia muncul di ruang kebudayaan itu.

Periode tahun 1950-an seringkali dianggap sebagai periode sejarah yang gelap bagia sebagian sejarawan. Namun demikian, dengan membaca apa yang ada di dalam ruang kebudayaan *Gelanggang*, maka akan tergambarkan bagaimana serunya

diskusi intelektual di era itu. Dan warta sepekan *Siasat* menyajikannya kepada masyarakat di zaman itu.

B. Rubrikasi Warta Sepekan *Siasat*

Pembagian rubrik (rubrikasi) dalam *Siasat* tidak terjadi secara tetap. Artinya rubrik ditampilkan berbeda-beda dalam kurun waktu tertentu. Pada penerbitan pertama tahun 1947 paling tidak sampai dengan 1949, rubrikasi di *Siasat* tampak sederhana. Cuma ada 12 halaman dengan pembagian Berturut-turut rubrikasi di *Siasat* pada nomor-nomor awalnya ditampilkan sebagai berikut:

Halaman	Nama Rubrik	Subtansi	Pengasuh
Halaman 1	Berita Utama (Headline)	Berita aktual/ terpenting	Rosihan Anwar
Halaman 2	Berita Dalam Negeri	Tentang situasi politik, ekonomi dan keamanan dalam negeri	Angota redaksi
Halaman 3	Opini/ Karangan khas	Tentatives	Penulis lepas atau Kontribuor
Halaman 4	Berita Daerah dan <i>Tempo</i> dan <i>Peristiwa</i>	-Tentang berita daerah - Tentang peristiwa- peristiwa penting	Anggota redaksi
Halaman 5	Opini Editor	Mengenai keadaan yang berlangsung saat itu. Semisal soal politik atau ekonomi	Pemimpin redaksi atau dewan redaksi lainnya
Halaman 6	Lampiran Kebudayaan "Gelanggan"	Tentang kesusasteraan, budaya, seni dan kadang-kadang filsafat	Ida Nasution, Chairil Anwar, Asrul Sani, Siti Nurani dan Rivai Apin
Halaman 7	Idem	Idem	
Halaman 8	Laporan perjalanan	Tentang keadaan daerah yang dikunjungi redaksi	Idem
Halaman 9	Berita ekonomi		Rosihan Anwar

Halaman 10	Internasional	Segala macam hal yang menyangkut perekonomian	Dewan Redaksi
Halaman 11	Halaman ekstensi, sambungan dari rubrik internasional dan ekonomi. Rubrik Tanah Tumpah darah.	Berita-berita luar negeri	Dewan Redaksi
Halaman 12	Tjetusan <i>Siasat</i> (kolom pojok) dan halaman iklan dan masthead.	Soal ekonomi dan internasional Advertensi	Dewan Redaksi
			Dewan Redaksi

Sesuai dengan definisi *Siasat* yang redaksi sebutkan di dalam *masterheadnya*, maka *Siasat* memuat semua berita yang berkenaan dengan tema sosial, ekonomi, budaya dan politik. Pada masa revolusi, terutama di wilayah yang diduduki Belanda, di mana informasi sepenuhnya dikuasai Belanda, kehadiran *Siasat* dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan berita versi republik yang tentu saja menambah pengetahuan mereka terhadap posisi republik Indonesia.

Redaksi *Siasat* berupaya menampilkan berita-berita aktual terbaru setiap pekannya. Masing-masing rubrik tersebut menurunkan berita pilihan yang sebelumnya telah diproyeksikan di dalam rapat redaksi. Rapat redaksi *Siasat* tak selalu diadakan di kantor, melainkan seringkali diselenggarakan di kediaman Soedjatmoko, di sela-sela diskusi yang banyak diikuti oleh para intelektual muda pada era itu. Namun pada saat Soedjatmoko bertugas di PBB, New York, Amerika Serikat, sejak Juli 1947 sampai dengan 1951, rapat redaksi dilakukan di kantor *Siasat*, Cikini No. 70. Soedjatmoko juga sempat menggantikan posisi Chairil Anwar sebagai penjaga rubrik kebudayaan *Gelanggang*.

Jika dilihat dari semua rubrik yang ada di *Siasat*, maka tampaklah persoalan yang juga sedang dihadapi oleh Indonesia di masa awal berdirinya. Berita utama yang dijadikan headline biasanya mengangkat soal-soal penting yang menyangkut nasib Republik Indonesia dan juga mengangkat berita-berita seputar peristiwa politik penting saat itu.

Dalam soal ekonomi misalnya, *Siasat* menurunkan berita soal *Karet Dalam Perekonomian Kita*. Artikel ini menjelaskan tentang kedudukan penting karet sebagai komoditi ekspor yang mendatangkan banyak keuntungan sejak zaman kolonial. Penulis menyarankan supaya pemerintah memberikan perhatian pada soal perkebunan karet yang dinilainya memiliki kandungan ekonomis sangat tinggi.

Sementara itu dalam rubrik internasional disajikan berita mengenai persoalan politik dan ekonomi yang sedang terjadi di luar negeri. Terkhusus tentang bagaimana Eropa pasca Perang Dunia Kedua, yang memiliki pengaruh langsung pada keadaan di Indonesia pada zaman revolusi itu. *Siasat* juga menurunkan berita-berita mengenai persidangan yang diselenggarakan di PBB, lebih-lebih ketika para diplomat perwakilan Indonesia di PBB memerjuangkan posisi Indonesia dan pengakuan kedaulatan PBB terhadap kemerdekaan Indonesia. Paling tidak dalam kurun sejak pertama kali berdiri sampai dengan penyerahan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda, *Siasat* tak jemu-jemunya menurunkan berita tentang lobi-lobi Indonesia terhadap dunia internasional.

Siasat memiliki beberapa rubrik tetap antara lain berita utama, berita daerah, rubrik kebudayaan *Gelanggan* dan laporan ekonomi. Namun beberapa

rubrik sisanya bersifat opsional, artinya tergantung kepada perkembangan situasi yang terjadi. Atau juga biasanya tergantung kepada redaksi akan memilih tema apa yang sekiranya layak diangkat sebagai berita. Redaksi juga selalu menerima tulisan dari para penulis lepas atau kontributor. Redaksi *Siasat* akan memuat naskah tersebut sepanjang gagasan di dalam tulisan tidak bertentangan dengan kebijakan redaksi. Semisal, tentu saja redaksi akan menolak tulisan mengenai pembelaan terhadap posisi Belanda di Indonesia. Beberapa kali *Siasat* menggunakan berita dari kantor berita Belanda, *Aneta*. Namun pada umumnya berita-berita tersebut tak memiliki bias politik yang tinggi dalam arti tidak mengandung keberpihakan kepada Belanda.

Memasuki tahun 1950, ada penambahan rubrik dan juga perubahan pada pembagian rubrik di *Siasat*. Rubrik-rubrik tersebut adalah:

Halaman	Nama Rubrik	Subtansi	Pengasuh
Halaman 1	Berita Utama (Headline)	Berita aktual/ terpenting	Dewan redaksi
Halaman 2	Berita Dalam Negeri dan Editorial Rencana, termasuk kolom pojok Bang Betjak	Tentang situasi politik, ekonomi dan keamanan dalam negeri	Rosihan Anwar atau Soedjatmoko
Halaman 3	Tanah Tumpah Darah	Tentatives Bunga rampai berita/Editorial	Dewan redaksi atau Kontributor daerah
Halaman 4	Karangan Dalam Negeri	-Tentang berita daerah - Tentang peristiwa- peristiwa penting dalam negeri	Anggota redaksi
Halaman 5	Kotak Pos	Memuat pengaduan masyarakat	Dewan redaksi
Halaman 6	Inilah Indonesia	Mengenai keadaan yang berlangsung saat itu. Semisal soal politik atau ekonomi	Dewan redaksi

Halaman 7	Lampiran Kebudajaan "Gelanggan"	Tentang kesusasteraan, budaya, seni dan kadang-kadang filsafat	Asrul Sani, Siti Nurani dan Rivai Apin
Halaman 8	Idem	Idem	Idem
Halaman 9	Luar Negeri	Berita-berita luar negeri	Dewan redaksi
Halaman 10	Tjatatan Internasional	Opini redaksi mengenai peristiwa yang terjadi di luar negeri	Rosihan Anwar dan Soedjatmoko
Halaman 11		Berita dalam kota Jakarta	Dewan Redaksi
Halaman 12	Goresan Ibukota	Aneka berita dan Advertensi	Dewan Redaksi
Halaman 13	Pahatan		

Dari tabel rubrikasi di atas ada beberapa penambahan rubrik, yakni Tjatatan Internasional, Kotak Pos, Inilah Indonesia, Goresan Ibukota dan Pahatan.

Tjatatan Internasional merupakan opini editor terhadap peristiwa yang terjadi di luar negeri. Tulisan yang diturunkan bukanlah murni berita *straight news* melainkan karangan yang sangat subyektif dan dapat dikategorikan opini editor. Karangan pada rubrik ini lebih bersifat analisis ketimbang mendeskripsikan apa yang terjadi.

Menarik untuk diperhatikan kehadiran rubrik Kotak Pos. Rubrik ini menampung beragam macam keluhan dari pembaca yang dalam hal ini mewakili masyarakat. Pada tahun 1950-an, *Siasat* mulai menyebar tak hanya di Jakarta saja, melainkan sudah sampai ke tangan pembaca di wilayah Jawa Barat bahkan sampai dengan Balikpapan, Riau. Sehingga pembaca yang mengirimkan surat pun datang

dari berbagai pulau di Indonesia dengan segala macam keluhan dan pendapatnya mengenai hidup di alam kemerdekaan ini.

Rubrik Inilah Indonesia seakan menegaskan tentang sebuah eksistensi baru dari bangsa yang baru lahir. Nama rubrik Inilah Indonesia seakan redaksi melakukan sebuah perkenalan kepada pembacanya bahwa “inilah negeri” yang baru bernama Indonesia. Namun isi dari berita yang ada di dalam rubrik ini menampilkan kepincangan-kepincangan sosial yang masih banyak terjadi di dalam masyarakat Indonesia yang sudah merdeka. Rubrik ini sekaligus menunjukkan bagaimana *Siasat* melontarkan kritiknya kepada pemerintah Indonesia dan juga sekaligus kontrol sosial terhadap penguasa yang menjalankan pemerintahan.

Memasuki tahun 1950, *Siasat* tidak lagi melancarkan kritik kepada Belanda. *Siasat* di masa merdeka ini mengalihkan perhatian dan sasaran kritik mereka kepada pemerintah Indonesia. Dalam pada itu *Siasat* berfungsi sebagai watchdog bagi kekuasaan di republik ini. *Siasat* tetap menjalankan fungsi persnya sebagai alat kontrol sosial masyarakat.

C. Distribusi dan Iklan di Warta Sepekan *Siasat*

Pada era awal berdirinya, distribusi *Siasat* yang mencakup Jakarta dan Sekitarnya. Namun seiring dengan keadaan yang semakin aman dan memungkinkan baginya untuk mengembangkan diri, jaringan distribusi *Siasat* pun mulai meluas. Tidak hanya dalam soal distribusi, *Siasat* pun memiliki wartawan-wartawan lokal yang menyumbangkan beritanya dari daerah peliputannya masing-masing.

Pada tahun 1951 sampai dengan 1952, jaringan distribusi *Siasat* merambah dari Medan hingga Kalimantan. Berikut daftar agensi *Siasat*:

	Lokasi Agen	Nama Kota
	Agensi Kp. Prapatan No. 35	Balikpapan
	Jalan Antara No. 340	Medan
	Taman Indra, Dj. Pasar Sapi	Lombok, Mataram
	Dj. Kelenteng No. 250	Makassar
	Toko Buku Hidup	Ternate
	Gasida	Kutaradja
	Tarutung	Sumatera Utara
	Denpasar	Bali
	Banjarmasin	Kalimantan Selatan
	Menado	Menado

Dengan keberadaan distribusi yang tersebar di beberapa kota itu memungkinkan *Siasat* mengembangkan jaringan pemasaran dan pemberitaannya. Oplag *Siasat* yang pada 1947 mencapai 12 ribu eksemplar per minggu, sejak tahun 1950-an semakin meningkat, bahkan menembus angka seratus ribu eksemplar.

Kemampuan *Siasat* untuk memperluas jaringan penjualannya menunjukkan bahwa manajemen penjualan warta sepekan ini memiliki jaringan kuat ke daerah. Tentu saja karena media massa khususnya mingguan masih jarang maka *Siasat* mendapatkan tempat di hati pembacanya. Selain itu beragamnya rubrik yang disuguhkan di *Siasat* menambah daya tarik buat para pembacanya.

Pada saat beberapa minggu berdirinya *Siasat*, majalah ini mampu meraup keuntungan cukup besar akibat berlipatgandanya permintaan berlangganan. *Siasat* juga, sebagaimana ditulis oleh Kahin sebagai media massa sosialis yang cukup berpengaruh, membawa wacana intelektual di media massa. Rubrik Gelanggang merupakan salah satu bukti bahwa *Siasat* memang merupakan media massa yang cukup berkualitas.

Seiring dengan makin terkenal dan tersebarnya *Siasat*, maka pemasangan iklan pun semakin bertambah. Beberapa iklan merupakan perusahaan yang memasang iklannya sejak tahun-tahun awal berdirinya *Siasat*. Namun kendati iklan ada, *Siasat* tetap mengandalkan oplag.

BAB IV

SIASAT SEBAGAI KONTROL SOSIAL

A. *Siasat* Sebagai *Watchdog*

Fungsi pers yang utama adalah kontrol sosial. Istilah yang sering digunakan adalah *watchdog* (anjing penjaga) yang dimaksudkan bahwa fungsi media massa adalah mengawasi jalannya segala bidang perikehidupan, termasuk tentu saja jalannya pemerintahan.

Sebagai surat kabar yang cukup berpengaruh pada zamannya, *Siasat* juga tidak mengabaikan fungsi utama sebagai media mas, yakni kontrol sosial. Menjadi menarik untuk diketahui bahwa *Siasat* membuat jarak tegas dengan kekuasaan, dalam hal ini dengan Presiden Soekarno. Oleh karena itu kritik-kritik *Siasat* acapkali pedas.

Tahun 1950, selepas penyerahan kedaulatan, Indonesia memasuki sebuah periode yang penuh dinamika. Masa percobaan demokrasi⁴⁶ ini dipenuhi dinamika perdebatan politik. *Siasat* ada pada masa ini dan menempatkan diri sebagai kontrol sosial. Dalam masa-masa yang sangat menentukan itu, *Siasat* yang lahir dari masa revolusi menyesuaikan diri di dalam iklim politik kemerdekaan. Jika pada masa revolusi *Siasat* lebih banyak menjalankan perannya sebagai media massa corong republik untuk melawan propaganda Belanda, maka pada saat kemerdekaan tiba dan Indonesia sudah berdiri sepenuhnya, maka *Siasat* mengalihkan perhatiannya kepada

⁴⁶ Istilah “percobaan demokrasi” ini dikemukakan oleh MC Ricklef dalam “*Sejarah Indonesia Modern*” (Jakarta: Serambi, 2006)

persoalan-persoalan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia sebagai bangsa yang baru berdiri. Seperti diketahui bahwa sebagai bangsa yang baru berdiri, Indonesia menjalankan beberapa kali perubahan sistem pemerintahan. Bila ditinjau sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia sejak tahun 1945, maka dapat dilihat bahwa dalam waktu relatif singkat Indonesia telah mengalami tiga kali perubahan konstitusi. Masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang rancangannya telah disetujui pada tanggal 16 Juli 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), dan formalnya berlaku sejak disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai tanggal 14 Desember 1945.
2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang rancangannya disusun oleh wakil-wakil Republik Indonesia dan BFO (Bijeenkomst voor Federal Overleg) yang piagamnya ditandatangani pada tanggal 14 Desember 1949.
3. Konstitusi tahun 1950 atau biasa disebut Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS 1950). Sesuai isi Pasal II Undang-Undang No. 7/1950, UUDS mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950. Konstitusi ini berlaku sampai dengan tanggal 5 Juli 1959.
4. Konstitusi 1945, yang berlaku kembali sejak adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang menyatakan konstitusi Republik Indonesia kembali ke UUD '45.⁴⁷

⁴⁷ Marwati Djoened Poesponegoro dan Noegroho Notosoetanto, *Sejarah Nasional Indonesia* (Balai Pustaka: Jakarta, 1993) hal., 210.

Setelah penyerahan kedaulatan pasca KMB, Indonesia menjalankan sistem demokrasi parlementer. Dalam periode yang juga dikenal sebagai periode liberal itu dipenuhi pertentangan politik di kalangan partai politik yang mengusung ideologinya masing-masing. Namun periode negara federal tersebut tak lebih dari setahun karena pada 17 Agustus 1950 bentuk pemerintah kembali kepada bentuk negara kesatuan.

Sebagai akibat dari perang kemerdekaan yang terjadi semasa revolusi, banyak prasarana yang hancur dan keadaan ekonomi yang buruk. Di bidang ekonomi masalah yang paling utama yang dihadapi oleh pemerintah Republik Indonesia adalah inflasi dan defisit keuangan negara.

Masalah lain yang tak kalah peliknya dihadapi oleh republik adalah persoalan kepegawaian, baik sipil maupun militer. Setelah selesai perang, jumlah pasukan harus dikurangi karena keuangan negara tidak bisa membiayai jumlah tentara yang berlebihan. Persoalan militer memang cukup menyulitkan. Ketika bentuk negara Indonesia masih federasi, didirikanlah Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau dikenal APRIS.

Dalam pembentukan APRIS tersebut pasukan inti terdiri dari pasukan TNI dan sisanya diambil dari kalangan bekas anggota Angkatan Perang Belanda. Ada sekitar 33 ribu tentara bekas personil angkatan perang Belanda yang bergabung ke dalam APRIS. Pembentukan APRIS ini merupakan salah satu keputusan KMB yang telah disetujui oleh Indonesia. Namun demikian persoalan pengintegrasian pasukan

Belanda dengan Indonesia itu menimbulkan persoalan psikologis yang cukup serius. Pasukan KNIL yang memiliki egosentrisme langsung menyatakan penolakannya kepada upaya penyatuan itu. Sebagai hasil dari konflik yang mencuat itu terjadilah peristiwa Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) di Bandung yang dipimpin oleh perwira Belanda Westerling.

Selain konflik bersenjata, satu per satu konflik politik pun bermunculan. APRA mengultimatum kepada Pemerintah RIS untuk tidak membubarkan Negara Pasundan. Kemudian Sultan Hamid II di Kalimantan Barat menentang upaya masuknya TNI ke wilayahnya dan bahkan ia menolahkan Menteri Pertahanan RIS masuk ke daerahnya. Di Maluku muncul gerakan separatis Republik Maluku Selatan (RMS) yang dipimpin oleh Andi Aziz.

Lantas bagaimana sikap *Siasat* di dalam menghadapi semua peristiwa yang terjadi saat itu? Tentu saja sikap *Siasat* sebagaimana ketika warta sepekan ini terbit, yakni kurang begitu simpati pada pemerintahan federal. Sikap seperti itu sudah ditunjukkan oleh *Siasat* sejak tahun 1948, ketika Rosihan Anwar, pemimpin redaksi *Siasat* berkeliling ke beberapa daerah yang berdiri sebagai negara bagian di Indonesia. Seperti telah disinggung pada pembahasan sebelumnya bahwa Rosihan Anwar menulis secara kritis tentang negara Pasundan dan tentang Negara Indonesia Timur yang menurutnya terserangan gejala “padukaisme”. Bahkan Rosihan secara pedas mengkritik keadaan di Bali semasa di bawah kekuasaan pemerintahan NIT.

Pada 17 Agustus, sebagaimana telah disinggung di atas, dengan resmi RIS dibubarkan dan dibentuk kembali negara kesatuan yang diberi nama Republik

Indonesia. Persiapan untuk membentuk negara kesatuan ini sudah dilakukan beberapa bulan sebelumnya, sebab di dalam negara-negara bagian kehendak untuk bersatu sudah lama timbul.⁴⁸

B. Siasat dan Politik Dalam Negeri

Dalam Warta Sepekan *Siasat* bentuk editorial tidak sebagaimana di dalam surat kabar lain yang mengutamakan subyektivitas si penulis. Editorial yang dimaksud di dalam *Siasat* lebih menyerupai editorial. Di dalam otobiografinya, *Menulis Dalam Air*⁴⁹ Rosihan Anwar, Pemimpin Redaksi *Siasat* menjelaskan bahwa editorial rencana bersifat memberitahukan, yang menjelaskan, lebih baik lagi menafsirkan. Sementara itu editorial boleh memperdebatkan, membantah, kadang-kadang melancarkan “perang salib”.

Rosihan kemudian menambahkan bahwa editorial yang memberikan penilaian, terkadang dia mengumumkan kebijaksanaan-kebijaksanaan, dia juga menyajikan hiburan. Adapun halaman editorial dalam surat kabar mencerminkan kepribadian publikasi itu. Ia suara pemimpin redaksi atau editor, ia membantu membentuk pendapat umum, ia mencerminkan pendapat orang-orang setempat perihal persoalan-persoalan vital. Tidak ada suatu gaya editoroal yang tertentu. Dia hanya bersifat tidak pribadi, impersonal. Pedekatannya adalah secara tidak diketahui namanya, anonymous.

⁴⁸ *Siasat*, 4 Mei 1948

⁴⁹ Rosihan Anwar, *op.cit.*, hal. 206

Membaca penjelasan Rosihan maka jelas bahwa rubrik Tanah Tumpah Darah adalah editorial. Rubrik ini tidak menyebutkan siapa nama penulisnya namun bersifat sangat pribadi. Dalam beberapa tulisan editorial *Siasat* melancarkan “perang salib” kepada lawan-lawan politik *Siasat*, terutama sekali PKI dan organisasi yang berafiliasi kepadanya.

Editorial pada warta sepekan *Siasat* diberi nama Tanah Tumpah Darah. Tidak ada nama penulis dalam editorial tersebut, sebagaimana editorial yang ditulis di sebagian besar surat kabar di Indonesia. Namun biasanya, karena Editorial Rencana mewakili pendapat dari redaksi terhadap satu atau lebih persoalan yang terjadi, maka pemimpin redaksi atau redaktur senior bertugas untuk menulis editorial tersebut.

Pada Warta Sepekan *Siasat*, isi editorial merupakan respon atau pendapat dari beberapa peristiwa penting yang terjadi pada saat *Siasat* terbit. Berbeda dengan editorial pada koran, *Siasat* biasanya mengangkat lebih dari satu isu (maksimal empat) untuk dibahas dalam setiap edisinya. Pada periode 1950 – 1957 ada sekira 364 editorial yang diturunkan oleh redaksi. Namun dalam pembahasan mengenai editorial ini, tidak semua tema editorial akan diangkat dalam penulisan tesis ini. Ada dua alasan, *pertama*, seringkali satu tema editorial berkembang menjadi tema yang terus menerus dibahas. Misalnya mengenai persoalan Irian Barat yang setelah pelaksanaan Konferensi Meja Bundar menjadi kontroversi. Pemerintah Belanda tidak mau menyerahkan Irian Barat dan berjanji akan membahasnya beberapa tahun kemudian. Utusan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Mohammad Hatta menyatakan kesetujuannya terhadap klausul soal Irian Barat yang diajukan oleh Belanda.

Singkat kata, sampai dengan penyerahan kedaulatan Indonesia oleh Belanda, persoalan Irian Barat dibiarkan mengambang. Tentu saja hal yang ditempuh oleh delegasi Indonesia itu mendapatkan respon yang cukup bervariasi di dalam negeri. Kelompok komunis, dalam hal ini Partai Komunis Indonesia (PKI), yang memang sejak peristiwa Madiun 1948 sangat membenci Mohammad Hatta, secara terus menerus mengeritik keputusan Hatta di dalam Konferensi Meja Bundar. PKI yang sejak periode tahun 1950-an mulai muncul kembali setelah peristiwa Madiun 1948 menganggap keputusan yang dicapai di dalam KMB merupakan rekayasa Belanda untuk tetap bisa menguasai wilayah Irian Barat yang pada saat itu disebut sebagai Holandia.

Kedua, benar tema atau persoalan yang diangkat ke dalam sebuah editorial biasanya sebuah peristiwa atau persoalan yang berimbas banyak pada kepentingan rakyat kebanyakan. Namun biasanya tema yang diangkat bersifat reflektif, semisal dalam soal peringatan hari-hari bersejarah. Semisal pada 10 November 1950, editorial *Siasat* menulis tentang pentingnya peranan pemuda dan organisasi pemuda di dalam mengisi kemerdekaan. Fokus terhadap peran pemuda merupakan pemikiran reflektif dari redaksi yang terinspirasi dari perjuangan para arek-arek Surabaya dalam pertempuran 10 November 1945. Kelak hari pertempuran itu diperingati sebagai hari pahlawan.

Bila diperhatikan, Editorial di dalam *Siasat* menyerupai seperti review namun tetap disertai rekomendasi, sebagaimana biasanya editorial-editorial rencana di media massa. Ada beberapa persoalan besar yang sering dikomentari oleh redaksi

Siasat. Namun lebih dari itu, biasanya *Siasat* selalu menampilkan posisinya yang berseberangan dengan PKI. Oleh karena itu pada beberapa editorialnya, *Siasat* selalu berlawanan dengan apa dilakukan oleh PKI. Misalnya di dalam kasus usulan pembatalan pelaksanaan keputusan KMB. PKI dalam hal ini Sarekat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) sebagai lembaga yang secara ideologis berafiliasi kepada PKI menentang hasil keputusan KMB.

Untuk persoalan penentangan hasil keputusan KMB oleh SOBSI tersebut *Siasat* edisi 22 Oktober 1950 menulis:

Bahwasannya persetujuan KMB mengandung pasal-pasal yang membatasi kemungkinan-kemungkinan ekonomi negeri kita adalah suatu hal yang tak bisa disangkal. Akan tetapi sebaliknya pembatalan persetujuan KMB itu begitu saja seperti yang dianjurkan oleh PKI di dalam parlemen atau pun oleh SOBSI dalam statementnya di Jogja daru-baru ini, adalah suatu jalan yang sukar bisa ditempuh pula dengan tidak membahayakan keadaan masyarakat kita. Baik diingat misalnya bagaimana nanti reaksi internasional kalau itu dilakukan. Padahal Rusia yang mungkin menyetujui tindakan itu tidak bisa diharap akan bisa membantu kita secara nyata.

Kini sebenarnya adalah suatu yang menggelikan artinya kalau dilihat secara teoritisnya bahwa justru dari sudut PKI dan SOBSI dikeluarkan usul-usul untuk membatalkan persetujuan KMB itu sebagai jalan keluar dari kesulitan masa sekarang. Lucunya adalah karena golongan-golongan itulah yang selalu menonjolkan diri sebagai kaum Marxis, yang dengan dialektiknya setara dengan teoritis, harus mengetahui juga bahwa yang terpenting bukan pertama-tama pembatalan atau tidak dari persetujuan KMB itu, melainkan pertimbangan kekuatan antara Indonesia dan Belanda. Justru menurut pandangan dialektik itulah maka ada tidaknya persetujuan KMB itu kurang penting karena dengan sepuluh persetujuan KMB Indonesia tidak bisa dihisap juga ekonominya, asal saja kekuatan masyarakat Indonesia baik ekonomi politik maupun apa saja melebihi kekuatan Nederland.

Sekarang kita bertanya: bagaimana kok sampai jago-jago historis materialisme itu malahan berpikir secara terbalik sama sekali dan mau menentukan perbaikan keadaan di sini sekedar pembatalan persetujuan KMB itu?

Dari yang diatas itu nyatalah bahwa menurut teori-teori PKI dan SOBSI sendiri sebenarnya langkah yang dianjurkannya itu salah sama sekali. Dan kalau kini anjuran itu dikemukakan dengan segala kehebatan maka nyatalah bahwa sebenarnya spekulasinya hanya hendak memainkan saja rasa tak puas, yang kini terdapat di kalangan masyarakat terhadap persetujuan KMB itu.

Perbaikan-perbaikan yang nyata baik jika dipikirkan secara dialektik atau pun secara logika biasa sudah terang tidak ada sama sekali.

Dari editorial di atas kita dapat melihat jelas betapa redaksi *Siasat* memiliki pandangan yang kritis kepada PKI. Kalau menengok kembali kepada perundingan KMB yang dimulai sejak 24 Agustus 1949 tampak kalau posisi delegasi Indonesia tersudutkan dengan beberapa kesepakatan perundingan. Belanda memang akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia dan mengakui bahwa Indonesia sudah merdeka di tahun 1949 itu. Namun di akhir perundingan, Belanda menyodorkan klausul yang menjadi dilema besar bagi delegasi. Salah satu klausul itu berbunyi bahwa pihak Indonesia harus menanggung beban utang Hindia Belanda sebesar 6,1 gulden. Dengan perincian, sebanyak 3,1 milyar gulden dalam bentuk utang luar negeri dan 3 milyar gulden utang dalam negeri. Untuk utang-utang itu pemerintah Belanda hanya mau menanggung 500 juta gulden saja sehingga jumlah keseluruhan utang warisan Hindia Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia sebesar 5,6 milyar gulden.

Secara lengkap hasil dari Konferensi Meja Bundar (KMB) adalah:

1. Serahterima kedaulatan dari pemerintah kolonial Belanda kepada Republik Indonesia Serikat, kecuali Papua Barat. Indonesia ingin agar semua bekas daerah Hindia Belanda menjadi daerah Indonesia, sedangkan Belanda ingin menjadikan Papua Barat negara terpisah karena perbedaan etnis. Konferensi ditutup tanpa keputusan mengenai hal ini. Karena itu pasal 2 menyebutkan

bahwa Papua Barat bukan bagian dari serahterima, dan bahwa masalah ini akan diselesaikan dalam waktu satu tahun.

2. Dibentuknya sebuah persekutuan Belanda-Indonesia, dengan monarki Belanda sebagai kepala negara.
3. Pengambilalihan hutang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat

Melihat keputusan KMB tersebut kontan saja kelompok PKI dan organisasi afiliasinya bersikap kontra terhadap apa yang dilakukan oleh delegasi di dalam perundingan KMB. Salah satu faktor yang juga mendukung sikap kontradiksi mereka terhadap delegasi adalah karena Mohamad Hatta yang bertindak sebagai ketua delegasi itu merupakan musuh PKI yang dianggap bertanggungjawab atas hukuman mati para pemimpin PKI, salah satunya Amir Sjarifuddin. PKI menganggap peristiwa Madiun pada 1948 tak lebih hanyalah provokasi yang dilancarkan oleh Hatta untuk menghabisi PKI. Para pemimpin PKI meyakini bahwa Mohammad Hatta turut di dalam konferensi Sarangan pada 1946 di mana dihadiri juga oleh delegasi Amerika Serikat yang menghasilkan keputusan *Red Drive Proposal* (Proposal Pembasmian Kaum Merah).

Sementara itu perlu pula digarisbawahi mengenai hubungan antara para pemimpin redaksi *Siasat*, khususnya Soedjatmoko dan Rosihan Anwar terhadap para pemimpin seperti Mohammad Hatta dan Sutan Sjahrir. Pertama-tama, terhadap Sjahrir, tentu saja kedua pemimpin *Siasat* tersebut dihubungkan secara ideologis karena mereka adalah simpatisan Partai Sosialis Indonesia (PSI). Sementara itu relasi

yang dibangun terhadap Hatta, selain karena basis kultural, kedua pemimpin *Siasat* memiliki musuh yang sama dengan Hatta, yakni komunisme yang direpresentasikan melalui PKI.

Oleh karena itu *Siasat* memiliki kepentingan untuk menyerang PKI. Dalam editorial di atas diperlihatkan bagaimana kritisnya *Siasat* terhadap PKI di dalam persoalan KMB. Bahkan *Siasat* cenderung meremehkan dan menyindir PKI, seperti pada kalimat, “*Sekarang kita bertanya: bagaimana kok sampai jago-jago historis materialisme itu malahan berpikir secara terbalik sama sekali dan mau menentukan perbaikan keadaan di sini sekedar pembatalan persetujuan KMB itu?*”.

Tampak pula pembelaan redaksi *Siasat* terhadap pelaksanaan hasil keputusan KMB, yang secara tidak langsung menampilkan realita bahwa mereka adalah simpatisan para delegasi KMB. Kenyataan bahwa ada beberapa klausul di dalam KMB yang jelas-jelas merugikan Indonesia seakan tak dipandang sebagai satu kerugian. Bahkan menurut *Siasat* pembatalan pelaksanaan keputusan KMB bisa mendatangkan kerugian bagi Indonesia sebagaimana dalam editorial yang mereka tulis, “*Akan tetapi sebaliknya pembatalan persetujuan KMB itu begitu saja seperti yang dianjurkan oleh PKI di dalam parlemen atau pun oleh SOBSI dalam statementnya di Jogja daru-baru ini, adalah suatu jalanyang sukar bisa ditempuh pula dengan tidak membahayakan keadaan masyarakat kita.*”

Sementara itu di dalam editorial *Siasat* edisi 18 Februari 1951 (lihat lampiran 2) dengan judul Pemogokan-Pemogokan redaksi *Siasat* kembali menunjukkan sikap ketidak setujuannya terhadap aksi-aksi tersebut:

Pemogokan-Pemogokan

“Ada orang mengatakan bahwa melihat gelagatnya, semua pemogokan-pemogokan itu direncanakan dibelakang layar, dikendalikan oleh seorang dayang yang menjalankan *Siasat* hendak melumpuhkan potensi produksi masyarakat kita. Kalau dalam segala pemogokan itu dipakai istilah-istilah seperti perlawanan terhadap imperialis menghancurkan kekayaan kapitalis atau menurut keadilan sosial, semuanya itu adalah etiket-etiket belaka yang harus menutupi maksud-maksud yang sebenarnya. Begitu pula, kalau diberbagai macam pemogokan itu tidak kelihatan adanya orang-orang segolongan yang tampil kemuka, itupun belum berarti mereka itu tidak ada, karena sang dalang tentunya tidak akan menonjolkan orang-orang yang bekerja baginya itu, dan berusaha menimbulkan kesan agar semua pemogokan-pemogokan itu lepas satu dengan lainnya. Selanjutnya, apa yang dikatakan tentang pemogokan-pemogokan itu sudah tentu berlaku pula untuk tindakan-tindakan lainnya seperti pembakaran gudang-gudang, kebun-kebun tebu dan sebagainya. Semua tindakan itu mengandung satu persamaan: mereka semuanya melumpuhkan potensi produksi masyarakat, dan menimbulkan kegelisahan yang bukan main besarnya. Kalau melihat berbagai kejadian-kejadian itu, memang teori yang demikian itu ada dasar kebenarannya

Di Sumatera Timur misalnya seakan-akan pemogokan-pemogokan dilakukan bergiliran dan selalu mulai dengan pemogokan pelabuhan, disertai atau diikuti oleh pemogokan-pemogokan pengangkutan. Karena segala barang makanan dan keperluan-keperluan sehari-hari lainnya harus didatangkan dari luar, maka dengan sendirinya upah para buruh jauh tidak mencukupi. Di situlah tiba saatnya untuk menuntut kenaikan-kenaikan

gaji lagi, yang kalau tidak dipenuhi dengan segera diikuti oleh pemogokan-pemogokan simpati, kalau dilain-lain tempat Siasat itu sudah memberi hasil yang diharapkan. Seakan-akan tujuan satu-satunya adalah asal mogok.

Siasat memandang pemogokan-pemogokan yang dilakukan oleh kelompok buruh di beberapa tempat, khususnya di Sumatera Timur, tak lain karena adanya kelompok-kelompok yang ingin memetik keuntungan dari aksi itu. Menurut Siasat, pemogokan buruh bukan semata-mata disebabkan karena keinginan buruh untuk menuntut kenaikan upah, melainkan juga karena adanya keinginan untuk melumpuhkan produksi masyarakat. Hal tersebut ditegaskan di dalam alinea akhir editorial, “Kalau melihat semuanya itu, ada kelihatan benarnya juga anggapan adanya tendens melumpuhkan produksi masyarakat itu yang dilakukan oleh beberapa golongan. Pun kelihatannya benar juga anggapan bahwa tuntutan-tuntutan seperti mengenai kenaikan-kenaikan upah dan seterusnya, itu bukan pertama-tama dimaksud untuk menaikkan upah. Sebab untuk menaikkan upah-upah itu baik nominal maupun riil yang pertama-tama perlu adalah jalannya produksi secara lancar.”

Terasa janggal jika sebuah media menunjukkan ketidakberpihakannya kepada masyarakat bawah yang dalam hal ini dipresentasikan oleh kelompok buruh yang sedang memerjuangkan nasibnya. Namun *Siasat* melihatnya dari sisi lain, dari soal siapa yang menggerakkan aksi-aksi itu. Dari editorial ini gamblang terlihat bahwa *Siasat* memiliki orientasi politik yang “kanan”, yang sama sekali tidak mendukung aksi-aksi pemogokkan yang tentu saja acapkali didukung bahkan dilakukan oleh organisasi-organisasi buruh yang berafiliasi kepada komunis.

Pandangan bahwa buruh tak perlu mogok untuk menuntut kenaikan upah menunjukkan sikap redaksi yang berseberangan dengan PKI. Kelompok komunis terkenal dengan gerakan buruhnya yang mengandalkan mogok sebagai alat perjuangan mencapai cita-citanya. Namun lagi-lagi *Siasat* sepertinya sama sekali menutup mata dengan apa yang dilakukan oleh PKI. Bisa disimpulkan kalau *Siasat* menjadikan PKI dan organisasi afiliasinya sebagai musuh. Lagi-lagi hal tersebut mencerminkan siapa yang berada di balik dapur redaksi.

Dalam editorial di atas juga *Siasat* mengajukan tuduhan bahwa pemogokan buruh itu tidak sepenuhnya diinisiasi oleh buruh kelas bawah, melainkan oleh para pemimpinnya, dalam bahasa *Siasat*, “pentolan-pentolannya”. Dengan kata lain *Siasat* melalui editorial ini ingin mengatakan bahwa buruh-buruh kelas bawah itu “dihasut” untuk melakukan aksi pemogokan demi kepentingan segelintir “pentolan-pentolannya”.

Jika demikian, dari dua editorial di atas bisa disimpulkan bahwa warta sepekan *Siasat* ini memokuskan fungsi mereka sebagai media kontrol sosial yang kritis kepada kelompok komunis. Tentu saja di beberapa editorial-editorial mereka, Presiden Soekarno juga acapkali menjadi sasaran kritik redaksi *Siasat*. Bahkan Rosihan Anwar selaku pemimpin redaksi *Siasat* selalu berpandangan negatif kepada Soekarno.

Latar belakang sikap anti-komunis *Siasat* bisa dimungkinkan karena posisi mereka yang dekat dengan kelompok PSI. Sementara itu sudah diketahui oleh umum bahwa pemimpin utama dari PSI, yakni Sjahrir, merupakan seteru dari Presiden

Soekarno. Perseteruan mereka dimulai sejak zaman pergerakan dan terus berlanjut hingga masa kemerdekaan.⁵⁰

C. Diplomasi Soal Irian Barat

Pada sidang BP KNIP tanggal 25 November 1949 Perdana Menteri Moh. Hatta menjelaskan bahwa penundaan soal Irian Barat dalam KMB tidaklah akan menguntungkan Belanda, karena sewaktu-waktu nanti hak menentukan nasib sendiri mesti berlaku pula bagi daerah ini. Menurutnya penundaan itu tak lain karena pertentangan keras antara delegasi Belanda dengan Indonesia. Usulan bahwa Irian Barat dijadikan “condominium” yang dikelola oleh Belanda dan Indonesia. Namun Hatta menolak usulan itu karena menurutnya langkah yang demikian sama saja menjadikan Irian sebagai wilayah jajahan dua negara.

Persoalan Irian Barat memang menjadikan satu persoalan yang sangat serius dan banyak dibicarakan oleh masyarakat pada saat itu. Belum masuknya Irian ke dalam wilayah Indonesia menumbuhkan keyakinan bahwa ada satu daerah di Indonesia yang masih dijajah oleh Belanda. Kebanyak media massa pun tak ketinggalan selalu menurunkan berita mengenai Irian Barat.

Setahun kemudian, dalam editorial Tanah Tumpah Darah edisi 5 November 1950 redaksi *Siasat* menurunkan tulisan mengenai Irian. Dalam rubrik ini

⁵⁰ Dalam buku Bung Hatta menjawab, didapatkan cerita bahwa perseteruan Bung Karno dan Sjahrir justru disulut oleh peristiwa kecil semasa pengasingan di Prapat. Saat itu, di rumah pengasingan, semua orang dijatah air untuk mandi. Bung Karno yang pada saat itu mandi sembari bernyanyi-nyanyi dibentak oleh Sjahrir dari luar kamar mandi, “Karno, houd je mond” tutup mulutmu, kata Sjahrir.

ditulis tentang rombongan parlemen yang dipimpin oleh Dr. Soekiman yang berangkat ke Belanda untuk menyelesaikan persoalan Irian yang masih belum mencapai titik temu setelah penyelenggaraan KMB.

Menarik untuk memperhatikan editorial *Siasat* kali ini. Bukan saja menyangkut persoalan Irian Barat yang berlarut-larut namun persoalan ini menjadi menarik ketika *Siasat* menyerang kelompok komunis Belanda dalam hal ini Communist Partij Nederland (CPN). Dalam tulisan editorial tersebut *Siasat* mengatakan, “ *Di kala misi akan berangkat ke Nederland, Partai Komunis Belanda yang dikenal dengan CPN mengeluarkan sebuah manifest mengenai Irian. Menurut juru warta “Waspada” di negeri Belanda. CPN menolak pendjadjahan Belanda di Irian, tapi djuga menentang Irian dimasukan ke dalam Indonesia, karena ini berarti “memberikan pangkalan perang pada Amerika melawan negeri sosialis”. Lalu CPN kemukakan supaja 5 negara besar termasuk RRT membitjarakan dan menentukan status Irian.*” Demikian ulas *Siasat* di dalam editorialnya.

Tidak berhenti di sana saja, *Siasat* pun kembali menyerang kelompok komunis dengan menghubungkan aksi CPN tersebut dengan apa yang dilakukan oleh PKI di Indonesia. *Siasat* menduga ada hubungan antara aksi CPN dengan pengunduran diri salah seorang anggota PKI yang urung batal pergi ke Belanda untuk mengikuti misi parlementer itu. Lebih lanjut dalam edisi yang sama *Siasat* menulis:

“Manifest CPN ini sangat menarik perhatian. Karena, dapatlah diraba dari sekarang bahwa partai komunis di Indonesia djuga akan mengikuti langkah demikian itu. Hal ini sudah lumrah bagi Siasat komunisme, bahwa partai2 Komunis di tiap2 negeri akan mengikuti satu garis Siasat.

Dalam hubungan ini kita teringat ketika misi parlementer Irian ini akan dibentuk dahulu. Untuk PKI ada disediakan satu tempat bagi wakilnya dalam misi, tapi mereka menolak turut serta karena alasan “sakit”. Melihat keadaan sekarang ini, setelah CPN mengeluarkan manifestonya maka ada harapan bahwa PKI juga akan “solider” pada kawan-seperjuangan untuk memperkuat dasar perjuangan “konkwen anti-imperialis”nya.

Editorial mengenai Irian yang kemudian dikaitkan kepada aksi-aksi kelompok komunis tersebut memang terasa tendensius. Namun, sebagaimana diungkapkan oleh Rosihan Anwar bahwa editorial dibolehkan untuk melancarkan “perang ” dan kali itu kembali dilakukan oleh *Siasat* di dalam hal yang berhubungan dengan soal komunis.

Namun jika melihat dari fakta yang berkembang setelahnya, dapat dilihat tentang besarnya peranan PKI di dalam upaya pengembalian Irian Barat ke pangkuan ibu pertiwi. Pada kurun tahun 1960-an banyak anggota Pemuda Rakyat yang dikirim ke Irian untuk turut merebut Irian. Tapi dari editorial ini tampak sekali pemihakan *Siasat* sebagai media massa yang mengambil posisi berseberangan dengan pihak komunis.

Persoalan Irian Barat tengah menjadi pembicaraan luas di kalangan masyarakat. Pada saat itu memang muncul pendapat bahwa Irian merupakan bagian inheren dari Republik Indonesia, terlebih bentuk geopolitik Indonesia dibentuk atas peninggalan penjajahan Belanda. Oleh sebab itu Irian yang juga merupakan wilayah jajahan Belanda yang berada di Indonesia semestinya diserahkan kepada Indonesia. Kerasnya upaya untuk mengembalikan Irian Barat tercermin dari pengiriman delegasi Indonesia ke Belanda.

Siasat edisi 9 Maret 1952 kembali menurunkan editorial mengenai pemanggilan pulang Soepomo yang sedang memimpin delegasi pemerintah Indonesia di Belanda yang sedang membicarakan perihal Irian. Dalam *Siasat* edisi tersebut ditulis:

Kembalinya Delegasi Soepomo

Para pemimpin politik sedang sibuk membentuk suatu kabinet. Timbul soal baru yang sebenarnya sudah biasa diramaikan akan berkembang seperti yang terjadi yakni dipanggilnya kembali Delegasi Supomo dari Nederland, setelah lebih dari 2 bulan dengan sia-sia berusaha mematahkan tekad Belanda untuk mempertahankan Irian.

Tampaknya baik Delegasi Indonesia dan Belanda belum berputus asa sebab dalam maklumat bersama yang dikeluarkan kedua delegasi tersebut menetapkan bahwa kembalinya Delegasi Supomo tidak berarti hilangnya kemungkinan untuk membuka perundingan lagi walaupun perundingan ditunda sampai pemerintahan Indonesia baru terbentuk.

Dapat dipastikan bahwa salah satu program yang penting dari kabinet yang akan dibentuk ialah penyelesaian soal Irian. Melihat dari sejak diserahkannya kedaulatan ke rakyat Indonesia menjadi pasal yang menimbulkan pertengkaran antara Indonesia dan Belanda maka hendaknya kabinet yang baru soal Irian, belajar dari program pemerintah sebelumnya. Pada kesempatan ini harus mencantumkan soal Irian di program pemerintah lebih untuk menarik simpati golongan yang terbesar rakyat Indonesia. Sejauh ini usaha tiap pemimpin-pemimpin Indonesia kearah itu tidak pernah membawa hasil. Pernah juga disinggung membuat Pemerintahan Darurat di Irian Barat yang dikepalai oleh seorang gubernur. Disiarkan juga usul mengadakan pemerintahan bersama, semua usaha ini tampaknya hendak membatasi soal Irian yang sebenarnya sudah mengandung anasir-anasir Internasional kepada batas-batas lingkungan nasional. Keseganan kedua pihak untuk menyerahkan soal Irian kepada suatu Badan Internasional yang competent misalnya Mahkamah Internasional menjadi bukti yang terang akan keinginan baik Indonesia maupun Belanda untuk tidak membawa negeri lain pada soal yang sedang mereka hadapi.

Editorial di atas menunjukkan kritik *Siasat* kepada kedua belah pihak di dalam upaya penyelesaian sengketa Irian Barat. Redaksi tidak melihat adanya itikad kedua belah pihak baik Indonesia maupun Belanda untuk melibatkan negara atau lembaga internasional untuk membantu penyelesaian Irian. *Siasat* seperti terdapat di dalam editorial tersebut malah menduga kedua belah pihak bersikeras untuk tak mengundang negara atau organisasi internasional mana pun untuk masuk ke dalam persengketaan mereka.

Setelah kegagalan yang berulang kali terjadi menyangkut diplomasi Indonesia kepada Belanda terkait soal Irian, maka pemerintah Indonesia sejak tahun 1954 setiap tahunnya berturut-turut membawa masalah Irian di dalam acara sidang Majelis Umum PBB. Persoalan Irian berulang-ulang dimasukkan ke dalam acara sidang Majelis Umum PBB, tetapi tidak pernah berhasil memperoleh tanggapan yang positif. Pada sidang Majelis Umum tahun 1957 Menteri Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan dalam pidatonya, ketika ikut dalam perdebatan bahwa Indonesia akan menempuh “jalan lain” yang tidak sampai kepada perang (*short of war*) untuk menyelesaikan sengketa Irian dengan Belanda, apabila sidang ke-12 sekali lagi tidak berhasil menyetujui resolusi tentang Irian.⁵¹

Pengembalian Irian Barat ke Indonesia baru sepenuhnya tercapai pada tahun 1964. Berbagai langkah diambil oleh pemerintah Indonesia termasuk membentuk Komando Pembebasan Irian Barat. Pertempuran sempat terjadi di Laut

⁵¹ Untuk soal ini bisa dilihat MC. Riklefs dalam *Sejarah Modern Indonesia* (Serami: Jakarta, 2005)

Arafuru yang mengorbankan Yos Sudarso, komandan KRI Matjan Tutul. Sepanjang penerbitan *Siasat*, warta sepekan ini selalu memuat atau membahas persoalan Irian di halaman-halaman depannya.

D. *Siasat* dan Parlemen

Kehidupan politik di era demokrasi liberal tentu teramat ramai. Pembicaraan mengenai status dan kedudukan anggota parlemen pun tak kalah menariknya untuk menjadi bahan pemberitaan di banyak media massa. Pada 1950, ada berbagai perdebatan mengenai parlemen.

Sidang BP KNIP pada 24 April 1950 membicarakan Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 tahun 1950 tentang pembentukan DPR dan Dewan pemerintahan daerah sebelum ada pemilihan umum. PP tersebut ditolak oleh PNI dan Masyumi. Kemudian soal pembentukan DPR dan Pemilu itu kembali dibicarakan dalam sidang BP tanggal 26 dan 28 April 1950. PNI dan Masyumi menganggap peraturan itu bertentangan dengan asa demokrasi dan bertentangan juga dengan segala UU pemilihan yang sudah ada.

Dengan berbagai perdebatan sengit di BP KNIP, akhirnya terbentuklah DPR dan DPRD di seluruh daerah di Indonesia. Para anggota DPRS RI dilantik Presiden Soekarno pada 16 Agustus 1950 pagi hari di Istana Merdeka. DPRS yang baru terbentuk itu diketuai oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat yang merangkap sebagai Ketua DPA sekaligus Ketua DPRS RI.

Pada 5 November 1950 *Siasat* menurunkan berita mengenai Kedudukan Anggota DPR. Sebagai lembaga yang baru tentu perlu dirumuskan bagaimana status anggota DPR dan juga kedudukan serta penghasilannya. *Siasat* juga menyoroti tentang hak istimewa anggota DPRS seperti sebagai berikut:

Para anggota itu tidak boleh ditangkap ketjuali setelah mendapat izin dari ketua Parlemen dan mereka dalam perkara harus diperiksa oleh Djaksa Agung, djadi tidak boleh pengadilan biasa.

Sebagai negara yang baru terbentuk maka segala bentuk keperluan menjalankan demokrasi, seperti menyusun DPRS menjadi agenda utama. *Siasat* pun memberikan komentarnya bahwa persoalan rumah tangga parlemen itu. Mulai dari soal gaji anggota DPRS sampai dengan persoalan “kekebalan hukum” yang mereka miliki.

Selanjutnya *Siasat* juga membuat editorial yang membahas persoalan DPRS seperti yang dimuat di dalam *Siasat* edisi 13 Januari 1952 ini:

Sidang Parlemen Babak I, 7 Januari 1952 dengan mengemukakan angka-angka dan perbandingan. Ketua Parlemen Mr.Sartono sampai pada kesimpulan. Pada tahun 1951 Parlemen kurang membicarakan mosi dan resolusi tahun 1950, parlemen lebih menghasilkan undang-undang. Salah satu dari beberapa pekerjaan parlemen: mengenai Anggaran Belanja Negara, begitu juga dengan Rancangan Undang-undang pengganti peraturan No 39. Rancangan Undang-Undang, Pemilihan Anggota Konstituante.

Dari keterangan Ketua parlemen, satu hal yang bisa diatasi: jaman liar dari Parlemen, tatkala anggotanya suka main “mosi-mosian” an, hal itu berangsur-angsur dapat diatasi. Selanjutnya Parlemen mengarah pada tugas dari Legislatip.

Parlemen yang tadinya saat jaman RIS lebih merupakan satu “Chek and balance-power” terhadap pemerintah, menguji dan memelihara keseimbangan, bukan menjatuhkan pemerintah, sesudah negara kesatuan berubah sifat menjadi Parlemen dalam arti yang sesungguhnya, pada hal susunannya tidak mencerminkan kehendak rakyat yang sesungguhnya.

Karena dari anggotanya banyak yang main tunjuk saja tidak satupun yang dipilih oleh rakyat Dimana sebagian yang ditunjuk adalah pernah menjadi kaki-tangan NICA yang mengkhianati perjuangan republik.

Keadaan seperti ini menimbulkan banyak kritik ke Pusat maupun di daerah, sebagaimana suara oleh pers. Yang dikehendaki semata-mata Melaksanakan Pemilihan Umum, dimana rakyat secara langsung dapat mengeluarkan suaranya secara bebas sehingga menjadi lebih representatif susunan parlemen nya. Berikut diharapkan pemerintah segera mengajukan memorie jawaban terhadap Parlemen mengenai rencana Undang-Undang Pemilihan Umum lalu segera mengadakan pemilihan Umum.

Pada editorial *Siasat* di atas disebutkan bahwa “*jaman liar dari Parlemen, tatkala anggotanya suka main “mosi-mosian” an, hal itu berangsur-angsur dapat diatasi*” menunjukkan kegagapan pada demokrasi yang baru saja dijalankan oleh bangsa Indonesia. Perbedaan pendapat di dalam parlemen yang salah satu wujudnya bisa dibuat menjadi sebuah mosi seakan tak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang santun.

Siasat juga melancarkan kritik kepada parlemen yang dianggap selalu mengganggu jalannya pekerjaan pemerintah dengan cara menjatuhkan pemerintah yang sedang berkuasa. *Siasat* mengajukan kritik bahwa hal tersebut tak lain karena anggota parlemen bukan merupakan hasil pilihan rakyat melainkan hasil dari penunjukan langsung. Bahkan *Siasat* menduga ada kakitangan KNIL atau bekas pegawai Belanda yang terpilih menjadi anggota parlemen sehingga selalu mengganggu jalannya pemerintahan.

Persoalan bekas anggota KNIL atau bekas pegawai Belanda atau bukan memang mengemuka pada tahun-tahun awal setelah penyerahan kedaulatan dari

Belanda kepada Republik Indonesia. Di dalam tubuh tentara pun terhadai penolakan terhadap bekas anggota KNIL sementara itu di kalangan politisi pun mencuat isu yang menyebut orang per orang yang pernah bekerja untuk Belanda. Soal ini pula yang agaknya disoroti oleh redaksi *Siasat* sebagai salah satu penyebab dari kisruhya parlemen.

Siasat, 20 Desember 1953 kembali melancarkan kritiknya pada parlemen. Kali ini editorial menurunkan tulisan yang berjudul *Demokrasi: Separoh + 1*. Editorial ini mengomentari persoalan di dalam tubuh Angkatan Perang (AP) dan Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI). Menteri Pertahanan Iwa Kusuma Sumantri yang menempatkan kroni-kroninya di dalam pucuk-pucuk kepemimpinan Angkatan Perang.

Parlemen kemudian memanggil Iwa namun ia tak menjawab pertanyaan dari anggota parlemen atas apa yang selama ini diberitakan tentangnya. Untuk persoalan tersebut *Siasat* berkomentar:

Dalam rapat tertutup telah disetujui oleh DPRS supaya interpelasi dan usul resolusi Subagio akan dibicarakan yang menghendaki diadakannya enquete oleh DPRS di dalam AURI segera setelah undang-undang enquete selesai dengan cara adu suara pula di tetapkan akan dibicarakan. Bila dilihat cara-cara seperti itu nyata sekali bahwa Partai-Partai Pemerintah dan penyokongnya dalam pengertian Demokrasi sudah jatuh artinya tinggal menjadi "Separoh tambah 1" saja.

Istilah "separoh tambah 1" merupakan ejekan *Siasat* terhadap jalannya demokrasi di Indonesia yang dinilai janggal atau ganjil. Hubungan sipil militer memang memburuk

pascaperistiwa 17 Oktober 1952. Dan persoalan yang diangkat oleh *Siasat* di atas merupakan imbas dari peristiwa tersebut.

Pada hakekatnya Peristiwa 17 Oktober 1952 mempunyai faktor-faktor penyebab di masa-masa sebelumnya. Sebagai akibat selesainya Perang Kemerdekaan, Indonesia menghadapi banyak persoalan, antara lain:

1. Keadaan politik yang labil dengan sistem demokrasi liberal model Eropa Barat (khususnya Belanda)
2. Keadaan sosial-ekonomi yang semakin memburuk dan korupsi yang semakin meluas
3. Persoalan pembebasan Irian Barat yang tidak cepat selesai
4. Kemerosotan integritas dan kemampuan aparatur pemerintahan, misalnya pertentangan antar intern partai-partai dan pergolakan intern dan ABRI⁵²

Namun lebih dari itu persoalan yang mendasar yang menyebabkan terjadinya persoalan 17 Oktober 1952 adalah ketidaksukaan militer terhadap kepemimpinan sipil yang dianggap terlalu jauh mencampuri urusan rumah tangga tentara. Perdebatan di Parlemen mencapai puncaknya ketika Manai Sophian dari PNI mengajukan mosi untuk menyelidiki seluruh persoalan reorganisasi tentara, termasuk pimpinan tinggi angkatan bersenjata dan Kementrian Pertahanan.⁵³

⁵² Marawati Djoened Poespnegoro dan Nugroho Notosutanto, *Sejarah Nasional Indonesia VI* (Balai Pustaka, Jakarta: 1993) hal. 246

⁵³ *Ibid.*, 249

Di kalangan DPRS muncul tuntutan agar kepemimpinan tentara pusat dibubarkan dan kementerian pertahanan diorganisasikan. Menghadapi tantangan tersebut, maka kelompok tentara pusat mengadakan unjuk kekuatan namun secara salah fatal menghitung kekuatan di sekitar mereka. Pada akhirnya aksi itu dapat diselesaikan oleh Presiden Soekarno dengan cara menemui para demonstran yang telah berkumpul di Istana Merdeka. Nasution diberhentikan sementara karena terlibat kasus tersebut.

Di dalam beberapa editorialnya, *Siasat* menampilkan bahwa konflik yang terjadi pada peristiwa 17 Oktober 1952 tersebut merupakan bentuk dari pertikaian antara sipil dengan militer. Editorial *Siasat* seolah ingin mengambil jalan tengah dalam urusan ini. Dalam beberapa hal, tampaklah keinginan mengambil jalan tengah itu. Di dalam *Siasat*, 7 Desember 1952 (lihat lampiran 3), misalnya. Editorial berikut ini ditujukan untuk penyelenggaraan pertemuan para gubernur namun dari isinya dapat tertangkap makna tentang dikotomi sipil militer.

Konperensi Gubernur

Tanggal 16-18 Desember 1952 mendatang akan diadakan Konperensi dinas Gubernur di Jakarta, yang akan membicarakan soal kepamongprajaan terutama soal anggaran Belanja, soal otonomi daerah dan soal Pemilu. Pun berhubungan dengan belum diatasinya masalah dalam negeri belakangan ini, di konperensi itupun para gubernur di harapkan memberikan laporan tentang keadaan di daerah nya.

Dalam hubungan ini dapat pula disebut surat edaran pemerintah pusat kepada para gubernur bahwa sekalipun ada kesulitan-kesulitan dalam urusan ketentaraan pemerintah sipil harus berjalan sebagaimana biasa. Boleh dikatakan bahwa justru dengan adanya ketegangan-ketegangan di lapangan Militer itu adalah suatu keharusan bahwa urusan

propaganda tidak boleh sampai terlantar. Dengan adanya ketegangan-ketegangan itu sudah cukup ruwet.

Segala pekerjaan pemerintahan sipil harus berjalan sebagaimana biasa. Bukan rahasia lagi bahwa dalam keadaan yang biasa jalannya pemerintahan sipil masih sangat memerlukan perbaikan. Belum siapnya ketetapan-ketetapan mengenai otonomi, mengenai pembatasan pekerjaan di berbagai lapangan, masih terasa akibatnya yaitu sekitar Anggaran Belanja. Juga mengenai ketetapan mengenai hubungan finansial antara Pusat dan daerah. Menanggapi persoalan tersebut diatas sangatlah tepat diadakan konperensi Gubernur.

Dari peristiwa 17 Oktober mencuat beberapa persoalan yang sebelumnya dipandang sebelah mata oleh para pemimpin di Jakarta. Persoalan anggaran keuangan pusat-daerah menjadi berita utama yang diperbincangkan pada saat itu. Kecemburuan Jawa versus luas Jawa bertumbuh di periode ini. Oleh karena itu persoalan otonomi daerah sudah menjadi agenda perbincangan di dalam pertemuan gubernur tersebut. Tentu saja semua isu yang dibicarakan di dalam pertemuan gubernur seluruh Indonesia itu berkaitan erat dengan apa yang terjadi beberapa pekan sebelumnya, yakni pada 17 Oktober 1952.

“Segala pekerjaan pemerintahan sipil harus berjalan sebagaimana biasa. Bukan rahasia lagi bahwa dalam keadaan yang biasa jalannya pemerintahan sipil masih sangat memerlukan perbaikan,” demikian editorial *Siasat* sekaligus mencerminkan pandangan terhadap kepemimpinan sipil saat itu. Pemimpin sipil seolah dikesankan seperti para politisi yang hanya bisa mengacaukan segala sesuatunya, berbeda dengan militer yang terbiasa berdisiplin. Dalam soal ini *Siasat*

mendukung dengan rencana pertemuan gubernur agar dicapai titik temu penyelesaian beberapa masalah di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pembangunan Indonesia pada zaman itu masihlah bertumpu kepada pusat. Artinya daerah seringkali tertinggal oleh pusat, dalam pengertian secara luas, Pulau Jawa. Salah satu problem yang muncul pada era tahun 1950-an adalah mencuatnya problem keharmonisan antara Jawa dan luar Jawa. Prasangka suku juga tak kalah pentingnya menjadi sebuah persoalan di Indonesia pasacakemerdekaan.

Siasat, melalui editorialnya melihat bahwa persoalan tersebut seharusnya bisa ditangani dengan mengadakan kordinasi dan mempertemukan segala macam gagasan yang dapat membangun Indonesia lebih baik. Soedjatmoko, salah satu pengasuh redaksi beberapa kali menulis tentang arti penting merumuskan diri dan mempertanyakan apa tujuan menjadi sebuah bangsa yang merdeka.

Soedjatmoko menulis bahwa revolusi nasional yang terjadi di Indonesia adalah jalan untuk mencapai kemerdekaan (*independence*), maka penting pula kiranya untuk memikirkan bahwa setelah kemerdekaan satu hal yang perlu dicapai adalah kebebasan (*freedom*) untuk menuju kesuksesan sebagai sebuah bangsa.

BAB V

KESIMPULAN

Siasat sebagai media massa yang didirikan pada zaman revolusi lahir dalam rangka membela kepentingan republik di dalam melawan perang informasi atau propaganda yang dilakukan oleh pihak Belanda. Ketika seluruh perangkat republik pindah ke Yogyakarta, *Siasat* memilih untuk tetap berada di Jakarta, di bawah cengkeraman NICA demi menjalankan tugasnya memberikan informasi tentang republik di daerah pendudukan Belanda.

Adalah Soedjatmoko dan Rosihan Anwar dua pendiri *Siasat* yang memiliki kedekatan secara khusus kepada Partai Sosialis Indonesia (PSI). Maka jikalau memang sebuah media massa identik dengan *personal journalism*, *Siasat* bisa disebut sebagai media massa sosialis. Tentu saja hal tersebut ada benarnya mengingat George McTurnan Kahin pernah menyebut bahwa *Siasat* adalah media massa sosialis yang paling berpengaruh di Indonesia.

Siasat yang didirikan pada 4 Januari 1947 memiliki peran penting di dalam sejarah pers di Indonesia. *Siasat* adalah mingguan pertama dan juga sekaligus media massa pembela kepentingan republik di masa ketika negeri ini diduduki oleh Belanda. Sebagai media massa corong republik, *Siasat* menyuarakan aspirasi rakyat Indonesia untuk merdeka dan lepas dari penjajahan Belanda. Hal penting lain yang turut disumbangkan oleh *Siasat* adalah berbagai pemikiran intelektual mengenai bagaimana bentuk Indonesia.

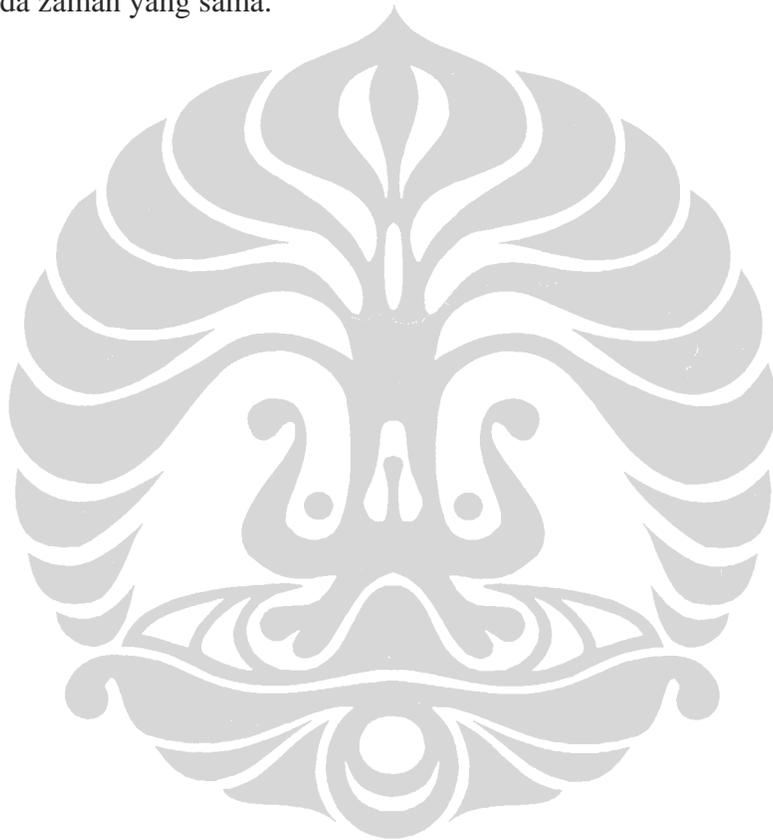
Siasat juga berkaitan erat dengan kepentingan perang informasi melawan pihak Belanda yang memiliki kepentingan untuk menguasai kembali wilayah Indonesia. Adanya bantuan keuangan dari Kementerian Penerangan RI kepada pihak pendiri *Siasat* membuktikan bahwa *Siasat* menjadi bagian tak terpisahkan dari kepentingan republik untuk melawan pengaruh informasi yang disebarkan oleh Belanda melalui terbitan-terbitannya, seperti *Het Uitzicht*.

Siasat di era tahun 1950-an, pascapenyerahan kedaulatan Belanda kepada Indonesia di Konferensi Meja Bundar (KMB), menjadi koran yang bersikap mengawasi jalannya kekuasaan di republik yang baru lahir ini. *Siasat*, yang semula adalah corong republik Indonesia di dalam perang informasi melawan Belanda, pada periode ini berubah menjadi alat kontrol sosial bagi sebuah pemerintahan yang sebelumnya dibelanya sendiri. Sehingga boleh dikatakan bahwa pada periode 1950-1957 *Siasat* menjadi media massa pengawas, sesuai fungsi sebagaimana adanya sebuah media massa di era demokrasi.

Siasat merupakan media massa yang memiliki pengaruh luas di bidang kebudayaan. Mengapa demikian? Karena pada media ini terdapat rubrik kebudayaan Gelanggang yang diasuh oleh para seniman dan sastrawan terkenal di masanya yang memuat banyak tulisan mengenai kebudayaan yang kemudian menjadi rujukan bagi para pemikir kebudayaan di Indonesia. Lebih dari itu rubrik ini memberikan arah baru kebudayaan Indonesia setelah kemerdekaan.

Fungsi yang demikian tidak sedikit pun mengurangi arti dari keberadaan *Siasat* di dalam alam kemerdekaan Indonesia. *Siasat* menyumbangkan begitu banyak

hal, mulai dari perdebatan intelektual sampai dengan tulisan-tulisan yang menyumbangkan pemikiran tentang ke arah mana seharusnya Indonesia menuju. *Siasat* adalah bagian inheren dari sejarah jurnalistik di Indonesia, dan media ini memiliki peran yang tak kalah pentingnya dengan media massa lain yang juga lahir pada zaman yang sama.



DAFTAR PUSTAKA

Suratkabar

Warta Sepekan *Siasat* edisi 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957.

Buku

Adji, Oemar Seno. 1977. *Pers, Aspek-aspek Hukum*, cet. Ke-2. Jakarta: Erlangga

Abar, Akhmad Zaini. 1995. *Kisah Pers Indonesia. 1966-1974*. Yogyakarta: LKIS

Abdullah, Taufik dan Abdurrachman Surjomihardjo. 1985. *Ilmu Sejarah dan Historiografi. Arah dan Perspektif*. Jakarta: PT Gramedia

Anwar, Rosihan. 1983. *Menulis Dalam Air, Sebuah Otobiografi*. Jakarta: Sinar Harapan

Budiardjo, Miriam. 1983. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia

Departemen Penerangan. 1955. *Almanak Pers Indonesia 1954-1955*. Jakarta: Departemen Penerangan

----- . 1971. *Garis Besar Perkembangan Pers Indonesia*. Jakarta: Serikat Penerbit Surat kabar-Pusat

Duverger, Maurice. 1982. *Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajawali

Feith, Herbert. 1962. *Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. New York: Cornell University Press

Feith, Herbert dan Lance Castle. 1988. *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*. Jakarta: LP3ES

Gottschalk, Louis. 1986. *Mengerti Sejarah*, cet. ke-5. Terjemahan Nugroho Notosusanto Jakarta: UI Press

I.N., Soebagijo. 1977. *Sejarah Pers Indonesia*. Jakarta: Dewan Pers

Jassin, H.B. 1984. *Surat-Surat 1943 – 1983*. Jakarta: Gramedia

Kahin, George McTurnan. 1990. *In Memoriam: Soedjatmoko, 1922-1989*. Dalam Indonesia. New York: Cornell University

Koesworo, FX. et. all. 1994. *Di Balik Tugas Kuli Tinta*. Solo: Sebelas Maret Press dan Yayasan Pustaka Nusantara

Lembaga Pers dan Pendapat Umum. 1959. *Kronik Pers 1957*. Yogyakarta: Lembaga Pers dan Pendapat Umum

Nursam, M. 2002. *Pergumulan Seorang Intelektual: Biografi Soedjatmoko*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

-----, ed. 2004. *Krisis daya cipta Indonesia : Polemik Soedjatmoko versus Boejoeng Saleh*. Yogyakarta : Ombak,

Panitia Konferensi Internasional. 1997. *Denyut Nadi Revolusi Indonesia*. Jakarta: Gramedia

Ricklefs, MC. 2004. *Sejarah Indonesia Modern, 1200-2004*. Jakarta: Serambi

Said, Tribuana. 1987. *Sejarah Pers Nasional dan Pembangunan Pers Pancasila*. Jakarta: Deppen

Siebert, Fred S. 1986. *Empat Teori Pers*. Jakarta: PT. Intermasa

Smith, Edward C. 1986. *Pembredelan Pers di Indonesia*, Cet. ke-2. Jakarta: Grafitipers

Soedjatmoko. 1984. *Etika Pembebasan, Pilihan Karangan tentang: Agama, Kebudayaan, Sejarah dan Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: LP3ES

-----, 1983. *Dimensi Manusia dalam Pembangunan: Pilihan Karangan*. Jakarta: LP3ES

Soerjomihardjo, Abdurachman. 2003. *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kompas

Soekanto, Soerjono. 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali

Supomo, R. 1974. *Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia*, Cet. ke-2. Jakarta: PT. Pradnya Paramita

Rachmadi, F. 1990. *Perbandingan Sistem Pers, Analisa Deskriptif Sistem Pers di Berbagai Negara*. Jakarta: Gramedia

Said, Tribuana. 1992. *H. Rosihan Anwar, Wartawan dengan Aneka Citra*. Jakarta: Harian Kompas

Taufik, I.. 1977. *Sejarah dan Perkembangan Pers di Indonesia*. Jakarta: P.T. Triyinc

Wright, Charles R. 1985. *Sosiologi Komunikasi Massa*. Bandung: Remaja Karya

